

# LKIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



# 2022

 **Jakarta**  
a city of collaboration

**DINAS BINA MARGA**  
**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA**  
**JAKARTA**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	.....
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	.....
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	6
1.2 GAMBARAN UMUM .....	6
<b>1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2.2 SUSUNAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA .....</b>	<b>8</b>
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA .....	19
1.4 PERMASALAHAN UTAMA .....	26
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	26
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>29</b>
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	31
2.2 VISI DAN MISI .....	32
<b>2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>34</b>
2.3 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	36
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	55
2.5 PENETAPAN KINERJA/ PENENTAPAN KINERJA TAHUNAN .....	59
2.7 KEGIATAN STRATEGI DAERAH 2022 .....	71
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>73</b>
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	73
3.2. CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH .....	89
3.3 CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN .....	92
3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR .....	98
3.5 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI .....	100
3.6 PERBANDINGAN SASARAN STRATEGIS ANTARA KEMENTRIAN PUPR DENGAN DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA .....	101
3.7 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DI LAKUKAN .....	103
3.8 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN).....	104
3.9 ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA PEN .....	105

3.10	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.....	106
3.11	INOVASI DAN PRESTASI DINAS BINA MARGA .....	107
3.12	TINDAK LANJUT ATAS SARAN DAN REKOMENDASI DALAM LAPORAN KINERJA TERHADAP BUDAYA KERJA ORGANISASI .....	110
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>112</b>
4.1	KESIMPULAN.....	112
4.2	SARAN.....	113

## **KATA PENGANTAR**

Tidak dapat dipungkiri dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda hampir seluruh Indonesia, dan khususnya di Jakarta, memberikan pengaruh yang cukup besar dalam segi arah dan sasaran pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta. Dengan banyaknya tugas dan fungsi yang dijalankan, Di tahun 2022 ini, Dinas Bina Marga mendapatkan amanat untuk mengelola anggaran sebesar Rp 2,55T pada awal tahun anggaran, namun setelah mengalami penyesuaian anggaran terkait kondisi pemulihan pasca Covid-19 yang masih berdampak sampai dengan saat ini maka, anggaran yang diamanatkan pada Dinas Bina Marga menjadi sebesar Rp 2,1T. Selama pandemi Covid-19, Anggaran Dinas Bina Marga lebih difokuskan pada program penyelenggaraan jalan khususnya pada sektor esensial yaitu kegiatan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkapannya, kemudian melakukan pemulihan dan percepatan program guna mencapai target pembangunan jangka menengah hingga 2022. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Ke Bina Margaan di masa pandemi ini juga dapat terlaksana dengan baik akibat adanya dukungan dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) sehingga Jembatan Pesakih di Jakarta Barat dapat terselesaikan dengan baik.

Dinas Bina Marga didukung oleh 4 Bidang, 3 unit organisasi dan 5 Suku Dinas Bina Marga Wilayah yang menjalankan 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) program. Pada tahun 2022, kerja keras Dinas Bina Marga dituangkan dalam Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Bina Marga sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga 2017-2022. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022, Dinas Bina Marga mencapai kinerja yang cukup memuaskan yaitu sebesar 94,01% (target) dari segi penyerapan anggaran dan capaian sebesar 85,69 % yang didapat dari rata-rata capaian kinerja semua indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis Dinas Bina Marga. Berbagai hasil pembangunan infrastruktur secara langsung telah dirasakan oleh masyarakat, antara lain

pembangunan jalan, trotoar, Jembatan Penyebrangan Orang, Jembatan Antar Kampung, Penerangan Jalan dan Utilitas.

Akhir kata, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja dan serta peningkatan kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Bina Marga  
Provinsi DKI Jakarta,

Dr. Ir. Hari Nugroho, MM.  
NIP. 196705161998031003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban kepada publik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diturunkan dalam bentuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Hal yang dibahas dalam laporan ini mencakup Gambaran Umum, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Perjanjian Kinerja, serta Akuntabilitas beserta Capaian Kinerja yang mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga Tahun 2022.

Laporan ini menyajikan hasil evaluasi terhadap 2 (Dua) Sasaran Strategis yang termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi yang dilakukan mencakup penilaian capaian kinerja yang menganalisis keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan diukur.

Rincian Tujuan dan Sasaran Strategis beserta capaiannya yang termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Capaian
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Semua Masyarakat Jakarta Most Livable City Index (MLCI)/Indeks Kota Layak Huni	63 poin	N/A	Sampai dengan laporan ini dibuat hasil belum disampaikan ke DKI Jakarta
2	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan, dan Terjangkau Bagi Semua Masyarakat Jakarta	Jumlah titik macet	0 titik	0 titik	Tercapai
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91 %	91,87%	Tercapai

Berdasarkan data diatas, secara umum capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Bina Marga tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik karena telah memenuhi target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rata-rata capaian 100% yang masuk dalam kategori baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, hanya satu target yaitu MLCI tidak dapat diukur capaiannya karena sampai dengan laporan ini dibuat hasil pendataan MLCI belum diterima oleh Pemprov DKI Jakarta.





## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing - masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Hal ini bertujuan untuk wujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, guna membina dan mempertanggungjawabkan anggaran, serta manajemen yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan jalan, dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

### **1.2 GAMBARAN UMUM**

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Unit Bina Marga yang ada di bawahnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 348 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga, Peraturan Gubernur No 349 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga dan Peraturan Gubernur Nomor 350 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

### **1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA**

Tugas pokok yang diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan jalan, dan jembatan beserta bangunan pelengkap jalan beserta perlengkapan jalan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas;
5. Perencanaan, pembangunan dan peningkatan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan beserta perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum;
6. Penelitian dan pengembangan di bidang jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan beserta perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum;
7. Pelayanan penyelidikan, pengujian dan pengukuran di bidang bina marga;
8. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan jalan, jembatan dan Bangunan pelengkap jalan beserta perlengkapan jalan;
9. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah untuk bidang jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan beserta perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum;
10. Pengelolaan data dan informatika di bidang bina marga;
11. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan beserta perlengkapan jalan;

12. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bina Marga;
13. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi peningkatan jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan dan peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan umum;
14. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
15. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
16. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
17. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah.

### **1.2.2 SUSUNAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan susunan organisasi sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas;**

**b. Sekretariat;**

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaran;
3. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
4. Subbagian Keuangan.

**c. Bidang Jalan dan Jembatan;**

1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

**d. Bidang Kelengkapan Jalan;**

1. Seksi Perencanaan Kelengkapan Jalan;
2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Jalan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Kelengkapan Jalan.

**e. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota;**

1. Seksi Perencanaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kota;

2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Kota; dan
3. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kota.

**f. Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum;**

1. Seksi Penerangan Jalan;
2. Seksi Penerangan Sarana Umum; dan
3. Seksi Pengembangan dan Logistik

**g. Suku Dinas Kota Administrasi;**

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Perencanaan;
3. Seksi Jalan, Jembatan\_ dan Kelengkapan Jalan;
4. Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Jalan Umum;
5. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan 6. Satuan Pelaksana Bina Marga Kecamatan.

**h. Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;**

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Satuan Pelaksana Peralatan; dan
3. Satuan Pelaksana Perbekalan.

**i. Unit Pengadaan Tanah Bina Marga**

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga Wilayah I;
3. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga Wilayah II;
4. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga Wilayah III;
5. Satuan Pelaksana Pendataan Tanah; dan
6. Satuan Pelaksana Pengamanan Aset.

**j. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga**

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian; dan
3. Satuan Pelaksana Pengukuran.

**k. Pusat Data dan Informasi Bina Marga**

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Satuan Pelaksana Pengelolaan Data; dan
3. Satuan Pelaksana Sistem Informasi.

**l. Kelompok Jabatan Fungsional;**

Uraian tugas dan fungsi dari Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta di atas adalah :

**A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga; dan
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga.

**B. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Bina Marga. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan kebijakan, Proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai

- denganlingkup tugasnya;;
- g. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah Dinas;
  - h. Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan kehumasan Dinas;
  - i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Dinas;
  - j. Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan;
  - k. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
  - l. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

**C. Bidang Jalan dan Jembatan**

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi jalan, jembatan dan simpang tak sebidang. Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Keija, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengendalian kegiatan pembangunan/peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang dengan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan/ peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang;
- g. Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan/peningkatan, pemeliharaan jalan,

- jembatan dan simpang tak sebidang;
- h. Pelaksanaan pembangunan dan presevasi peningkatan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang;
  - i. Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang;
  - j. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit ke,selamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
  - k. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - l. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yan.g diberikan oleh Kepala Dinas.

**D. Kelengkapan Jalan**

Bidang Kelengkapan Jalan mempunyai tugas perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan kelengkapan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang KelengkapanJalan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Simpangdan Jalan Tak Sebidang;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Jalan Tak Sebidang;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan simpang dan jalan tak sebidang termasuk jalan orang tak sebidang dan perlengkapannya;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan simpang dan jalan tak sebidang termasuk jalan orang tak sebidang dan perlengkapannya;
- e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pembangunan dan peningkatan simpang danjalan tak sebidang termasuk jalan orang tak sebidang dan perlengkapannya;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem perencanaan. pelaksana, pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan simpang dan jalan tak sebidang termasuk jalan orang tak sebidang dan perlengkapannya;
- g. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan dan

peningkatan simpang dan jalan tak sebidang termasuk jalan orang tak sebidang dan perlengkapannya;

- h. Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang termasuk jalan orang tak sebidang dan perlengkapannya;
- i. Pemrograman dan penganggaran. perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi kegiatan pembangunan dan peningkatan simpang dan jalan tak sebidang termasuk jalan orang tak sebidang dan perlengkapannya;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan simpang dan jalan tak sebidang termasuk jalan orang tak sebidang dan perlengkapannya;
- k. Pelaporan dan pertanggungjawaban Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang.

**E. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota**

Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, peningkatan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan

prasarana dan sarana Utilitas Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan/peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas kota dengan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan/peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas kota;



- g. Pelaksanaan uji coba/ mock up terhadap peralatan., material teknis dan teknologi terbaru Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota;
- h. Pelaksanaan koordinasi penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi Dinas lingkup Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota;
- i. Pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana utilitas kota;
- j. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis prasarana dan sarana utilitas kota kepada instansi lain;
- k. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan,
- l. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**F. Bidang Penerangan Jalan dan Sarana umum**

Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penerangan jalan dan Sarana Umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan verifikasi tagihan rekening listrik pencahayaan kota terhadap dayayang terpasang;
6. pelaksanaan proses penyambungan daya listrik penerangan jalan dan Sarana Umum;

7. Pelaksanaan uji coba/ mock up terhadap peralatan, material telmis dan teknologiterbaru penerangan jalan dan Sarana Umum;
8. Pelaksanaan perencanaan teknis penerangan jalan dan Sarana Umum;
9. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas penerangan jalan dan Sarana Umum;
10. Pelaksanaan koordinasi penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai penerangan jalan dan Sarana Umum;
11. Pelaksanaan pengembangan penerangan jalan dan Sarana Umum;
12. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan perbekalan teknis untuk kebutuhanpenerangan jalan dan Sarana Umum;
13. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen penerangan jalan dan Sarana Umum;
14. pelaksanaan proses serah terima sarana pencahayaan kota atas peran serta masyarakat dan pengembang;
15. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerangan jalan dan Sarana Umum;
16. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
17. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**G. Suku Dinas Kota Administrasi**

Suku Dinas Kota mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang jalan dan penyelenggaraan penerangan jalan umum pada Kota. Suku Dinas Kota Administrasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Keria, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas Kota;
4. Pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas Kota;

5. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembaran, trotoar dan perlengkapan jalan, prasarana dan sarana utilitas kota dan penerangan jalan dan sarana umum pada lingkup Kota Administrasi;
6. Pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, perlengkapan jalan dan prasarana dan sarana utilitas kota serta penerangan jalan dan sarana umum pada lingkup Kota Administrasi;
7. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar dan perlengkapan jalan serta prasarana dan sarana utilitas kota dan penerangan jalan dan sarana umum;
8. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasarankegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar dan perlengkapan jalan, prasarana dan sarana jaringan utilitas dan penerangan jalan dan sarana umum termasuk yang dilaksanakan oleh pihak lain;
9. Pelaksanaan leger jalan;
10. pelaksanaan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
11. pengoordinasian penegakan peraturan perundangundangan di bidang bina marga pada lingkup Kota Administrasi;
12. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kota; m. pelaksanaan penyediaan, perneliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
13. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
14. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

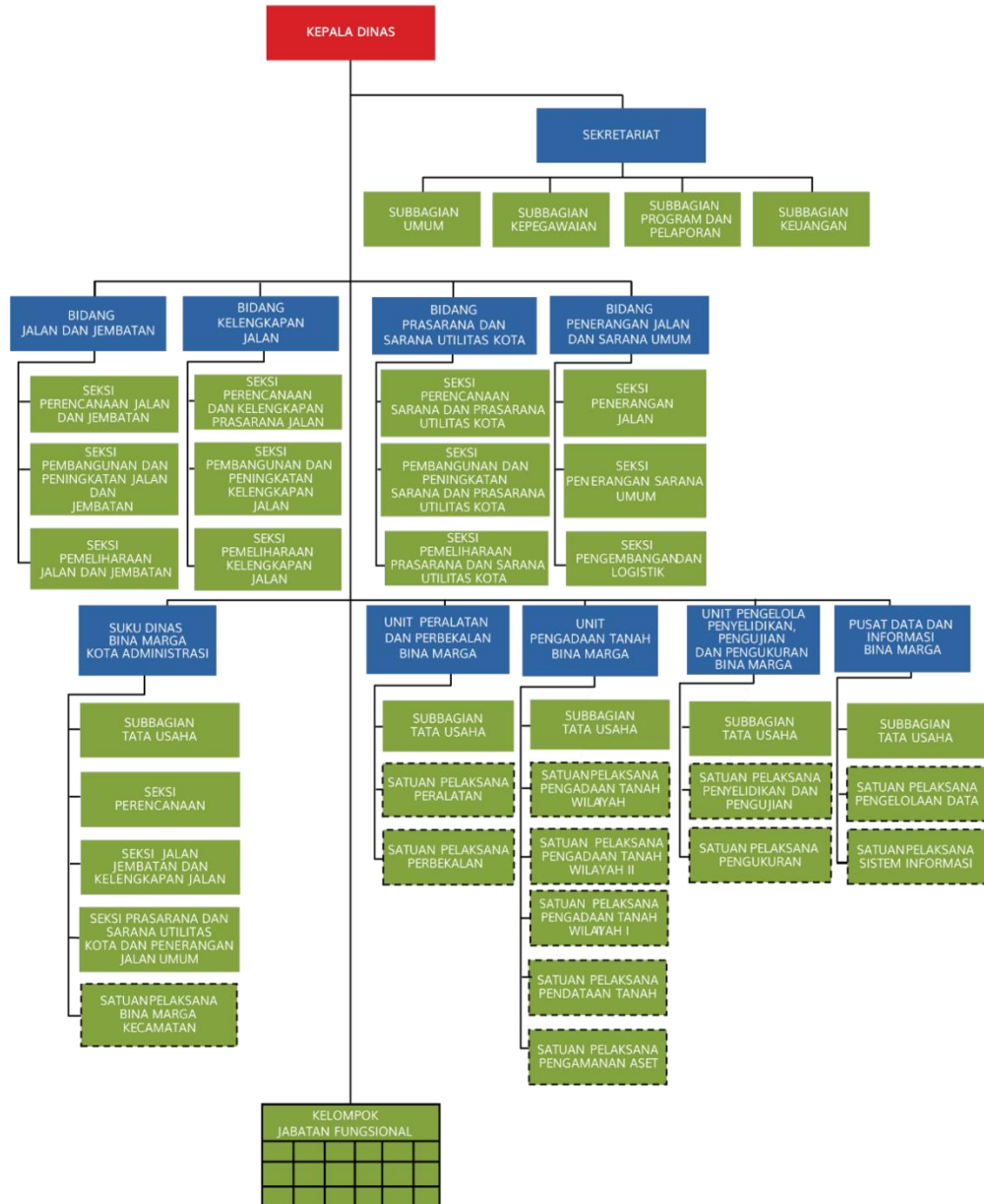
#### ***H. Unit Pelaksana dan Unit Pengelola***

Dinas Bina Marga mempunyai dua Unit Pelaksana dan satu Unit Pengelola untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Bina Marga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana dan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Pergub Nomor 348 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;
2. Pergub Nomor 349 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran;
3. Peraturan Gubernur Nomor 350 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga

### **1.3 SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam rangka penuntasan Isu Strategis Daerah, selain diperlukan kebijakan penyusunan program/kegiatan yang direncanakan dengan dengan baik dan terperinci, juga diperlukan dukungan lain berupa tersedianya sumber daya yang berkualitas yang dapat menunjang kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya itu dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, maupun alat-alat penunjang.

Terkait dengan dukungan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai sebanyak 480 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar pada Dinas dan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi serta Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan. Komposisi PNS pada tiap unit ditunjukkan pada Gambar 1.3 sebagai berikut: Kepala Dinas dengan jabatan struktural lapis kedua (Eselon II). Tugas Kepala Dinas (eselon II) dibantu oleh Eselon III sebanyak 13 orang terdiri dari 1 Sekretaris Dinas dan 4 (empat) Kepala Bidang, 4 (empat) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan 5 (lima) Kepala Suku Dinas Kota Administrasi. Untuk Eselon IV yang ada di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, dan Suku Dinas Bina Marga Lima Kota Administrasi sebanyak 35 orang, sedangkan untuk jabatan fungsional umum yang ada di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, dan Suku Dinas Bina Marga Lima Kota Administrasi, termasuk Satuan Tugas Pelaksana Dinas Bina Marga Tingkat Kecamatan sebanyak 293 orang.





Tabel 1. Susunan Pejabat Eselon II dan III Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Bina Marga Lima Kota Administrasi Per 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Foto
1.	Hari Nugroho	Kepala Dinas  <i>Pendidikan :</i> <i>S1 Teknik Geologi, UPN Veteran Yogyakarta</i> <i>S2 Magister Manajemen, Universitas Persada Indonesia</i> <i>S3 Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Jakarta</i>	
2.	Taufik Hendayana	Plt. Sekretaris Dinas  <i>Pendidikan :</i> <i>S2 Teknik Studi Ilmu Lingkungan Univ. Padjajaran</i>	
3.	Bernhard F.M. Gultom. ST, MT	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan  <i>Pendidikan :</i> <i>S1 Teknik Sipil, U.Tarumanegara</i>	

No	Nama	Jabatan	Foto
4.	Ir. Benhard Hutajulu, MT	Plt. Kepala Bidang Kelengkapan Jalan  <i>Pendidikan:</i> <i>S2 Teknik Sipil Universitas Indonesia</i>	
5.	Hananto Krisnawardoyo	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Kota  <i>Pendidikan :</i> <i>Teknik Sipil, Universitas Trisakti</i>	
6.	Samsul Bakri	Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum  <i>Pendidikan</i> <i>S-I Pendidikan Teknik Mesin</i>	
7.	Eko Kardiyanto	Kepala Unit Pengadaan Tanah  <i>Pendidikan :</i> <i>STPDN- Sumedang</i>	



No	Nama	Jabatan	Foto
8.	Taufik Hedayana	Kepala Unit Peralatan & Perbekalan Bina Marga  <i>Pendidikan :</i> <i>S2 Teknik Studi Ilmu Lingkungan Univ. Padjajaran</i>	
9.	M. Soleh	Kepala UP. Penyelidikan, Pengujian, & Pengukuran Bina Marga  <i>Pendidikan :</i> <i>S2 Teknik Studi Pembangunan ITB</i>	
10.	Wiwik Wahyuni. S,Sos, M.Si	Kepala Pusat Data dan Informasi  <i>Pendidikan :</i> <i>S2 Administrasi Publik STIE Mandala</i>	
11.	Agustio Ruhusesto	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat  <i>Pendidikan :</i> <i>S1 Teknik Sipil Universitas Trisakti</i>	

No	Nama	Jabatan	Foto
12.	Darwin Ali, ST, MM	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat  <i>Pendidikan :</i> <i>S2 Manajemen Universitas Borobudur</i>	
13.	Ir. Heru Suwondo	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan  <i>Pendidikan :</i> <i>S-2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-STIA YAPAN Administrasi Negara</i>	
14.	Ir. Benhard Hutajulu, MT	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur  <i>Pendidikan:</i> <i>S2 Teknik Sipil Universitas Indonesia</i>	
15.	Ir. Ilham Raya, MT	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara  <i>Pendidikan :</i> <i>S2 Teknik Manajemen Pantai Universitas Gadjah Mada</i>	

**Dinas Bina Marga: 214 Orang**

**Suku Dinas Bina Marga  
Kota Adm. Jakarta Barat:  
52 Orang**

**Suku Dinas Bina Marga  
Kota Adm. Jakarta Utara:  
47 Orang**

**Suku Dinas Bina Marga  
Kota Adm. Jakarta Selatan:  
55 Orang**

**Suku Dinas Bina Marga  
Kota Adm. Jakarta Pusat:  
54 Orang**

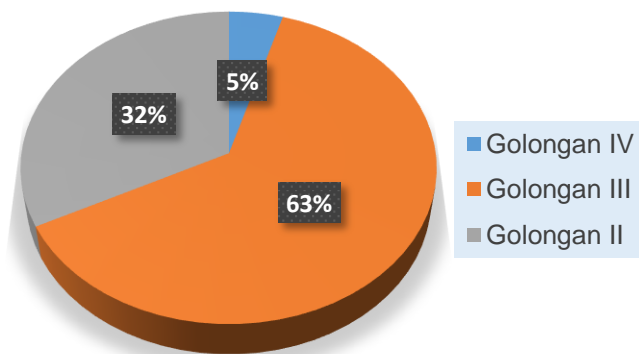


**Suku Dinas Bina Marga  
Kota Adm. Jakarta Timur:  
58 Orang**

Gambar 2. Komposisi PNS Dinas Bina Marga

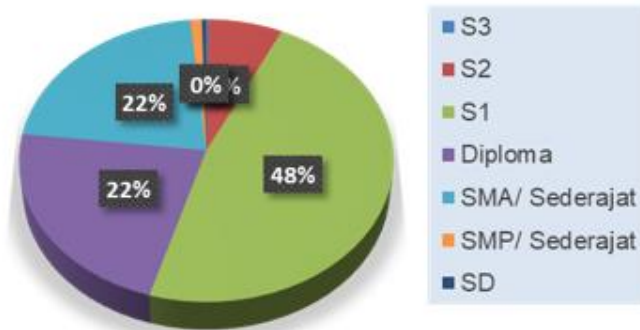
Rincian PNS Dinas Bina Marga berdasarkan kualifikasi (a) golongan, (b) pendidikan, dan (c) jabatan ditunjukkan pada Gambar 3. sebagai berikut:

**(a) Kualifikasi Golongan**



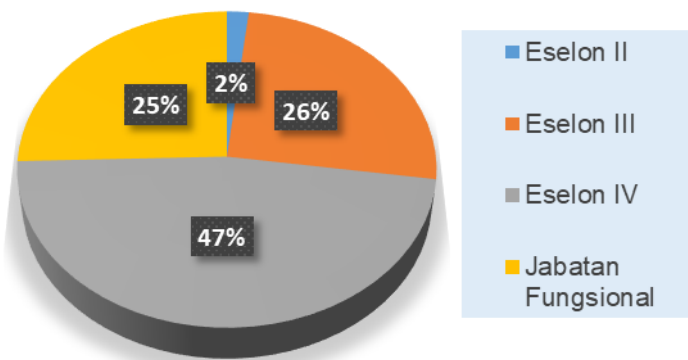
Kualifikasi	Jumlah PNS (Orang)
Golongan IV	22
Golongan III	302
Golongan II	156

**(b) Kualifikasi Pendidikan**



Kualifikasi	Jumlah PNS (Orang)
S3	1
S2	33
S1	228
Diploma	107
SMA/ Sederajat	104
SMP/ Sederajat	5
SD	2

**(c) Kualifikasi Jabatan**



Kualifikasi	Jumlah PNS (Orang)
Eselon II	1
Eselon III	14
Eselon IV	26
Jabatan Fungsional	14

Gambar 3. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan kualifikasi: (a) pendidikan, (b) golongan dan (c) jabatan

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Sekretariat, data per 31 Desember 2021)

Berdasarkan data yang dijabarkan pada Gambar 3. diatas, per 31 Desember tahun 2021, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta didukung oleh oleh Sumber Daya berupa PNS yang mayoritas memiliki kualifikasi 25 Pendidikan Strata-1 (S1) dengan persentase sebanyak 48%, selain itu informasi lain yang dapat diperoleh adalah mayoritas PNS pada Dinas Bina Marga adalah memiliki pangkat Golongan III dengan persentase 63% dari total seluruh jumlah pegawai.

#### **1.4 PERMASALAHAN UTAMA**

Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah DKI Jakarta adalah masalah pengembangan transportasi yang perlu terus diintegrasikan termasuk pembangunan trase-trase infrastruktur transportasi publik untuk kemudahan mobilitas warga Ibu Kota dan Jabodetabek. Oleh karena itu, apabila diselaraskan kedalam Tugas Pokok dan Fungsi, maka langkah yang dapat dilakukan oleh Dinas Bina Marga untuk menanggulangi permasalahan yang ada , dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Peningkatan Penggunaan (Ridership) Angkutan Umum Massal
- Penyediaan, Pengelolaan dan pengembangan pencahayaan kota yang hemat energi
- Pengembangan dan penataan prasarana jaringan utilitas bawah tanah
- Penataan jalan orang/ lingkungan/ kampung Kawasan pemukiman
- Penanganan fungsi jalan mantap
- Peningkatan konektivitas & road ratio

#### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan uraian diatas, sistematika penyajian LKIP Dinas Sumber Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

##### **Bab I – Pendahuluan**

Bagian ini menyajikan Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Aspek Strategis Organisasi, Struktur Organisasi, Sumber daya Manusia, dan ; Permasalahan Utama yang menjadi titik berat konsentrasi Dinas Bina Marga

## **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Bagian ini menguraikan secara ringkas Rencana Strategis Dinas Bina Marga yang di tuangkan didalam Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Bina Marga beserta Indikator Kinerja, Strategi, dan Kebijakan yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD dan Renstra) serta ikhtisar Perjanjian Kinerja

## **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

Bagian ini menjabarkan perhitungan capaian kinerja, realisasi penyerapan anggaran, dan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya disertai dengan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta hambatan/permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

## **Bab IV – Penutup**

Bagian ini menguraikan resume mengenai pencapaian kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 disertai dengan strategi, upaya, dan inovasi yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.



## **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**

Menindaklanjuti RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Untuk perencanaan 5 tahun kedepan dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Rencana Strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam tiap tahunnya, Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan KUA-PPAS dan selanjutnya dalam penyempurnaan RKA sampai dengan penetapan DPA SKPD Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Berdasarkan DPA SKPD tersebut, dibuat Perjanjian Kinerja/Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Dinas. Penetapan Perjanjian kinerja (Perkin) tahun 2022 sebagai target kinerja tahunan dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan atau kegagalan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan



tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Rencana strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) Dimana kita berada sekarang?; (2) Kemana kita akan menuju?; dan (3) Bagaimana kita menuju ke sana? Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. RKPD Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA sementara yang akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan DKI Jakarta yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan menetapkan program pembangunan daerah yang termasuk dalam program dedicated dan menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan. Dalam hal ini Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menetapkan program dalam sebahagian urusan pekerjaan umum dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)/Perkin yang ditetapkan.

## **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2018 yang telah digunakan sebagai acuan dalam memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun. Sehingga fungsi Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
2. Sebagai *alat* untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.
3. Sebagai *alat* bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategi.

Adapun manfaat disusunnya Rencana Strategis adalah :

1. Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber dana pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis untuk pencapaian visi dan misi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
2. Menjadi acuan seluruh unit kerja di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja unit-unit kerja di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.
4. Menjadi acuan bagi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kerjanya.

Visi, misi, tujuan / sasaran strategis serta strategi pencapaian (program dan kegiatan) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan secara singkat di bawah ini.

## 2.2 **VISI DAN MISI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja, Pemerintah Daerah, Visi dan Misi dari Perangkat Daerah merupakan Visi dan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode tersebut.

Adapun Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

### **VISI :**

**“JAKARTA KOTA MAJU, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG WARGANYA TERLIBAT DALAM MEWUJUDKAN KEBERADABAN, KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA”**

### **MISI :**

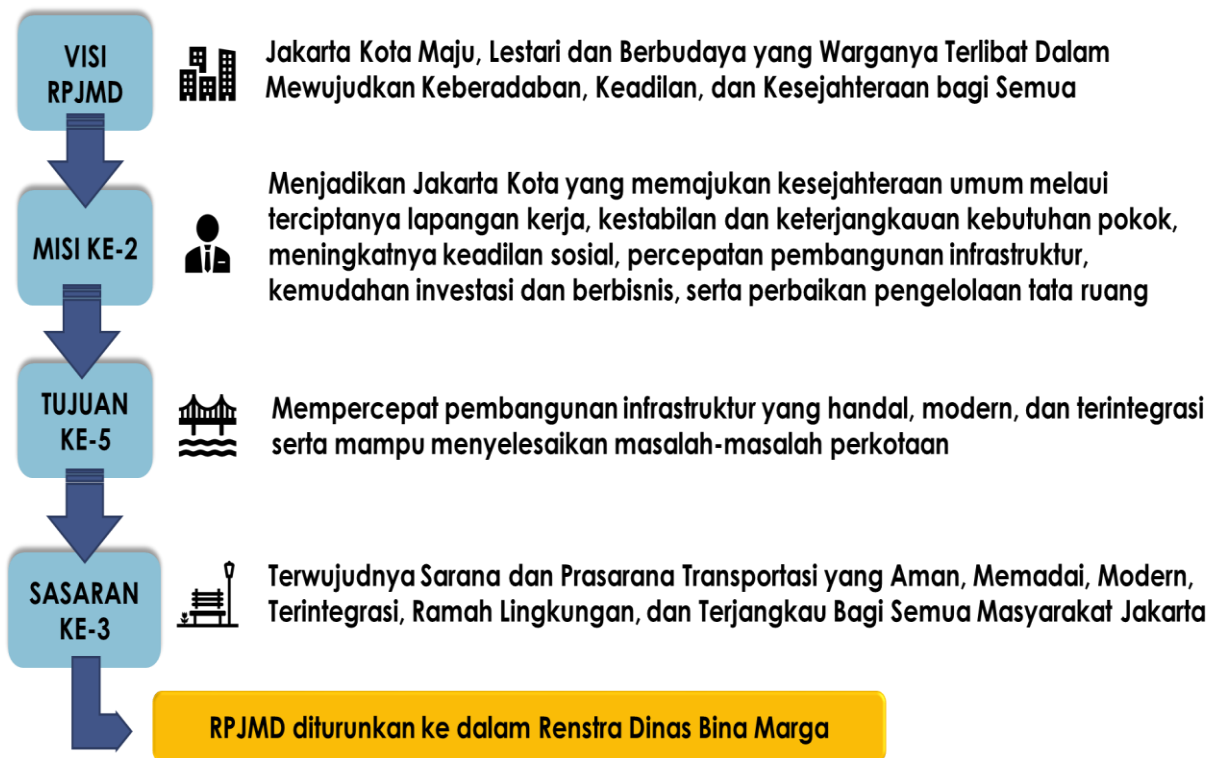
- 1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.**
- 2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.**
- 3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.**

- 4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.**
  
- 5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.**

Sebagai Perangkat Daerah yang bekerja di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Visi dan Misi tersebut merupakan isu utama yang dijadikan pedoman dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022.

Sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang bina marga, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta memiliki peran yang cukup besar dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, diantaranya dalam **merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur**, mentransformasi Ruang Manfaat Jalan menjadi ruang kota yang lestari, **dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial**, serta **menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan**. Hal ini sesuai dengan misi ke-2 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

## KETERKAITAN RPJMD DAN RENSTRA



Gambar 4. Skema keterkaitan RPJMD dan RENSTRA

### 2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam RPJMD Provisi DKI Jakarta 2017 – 2022, telah ditetapkan bahwa program kerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan, memiliki peranan untuk mendukung Misi ke-2 RPJMD yaitu **“Menjadikan Jakarta, kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”**. Visi dan Misi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta di atas lebih lanjut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Tujuannya adalah **“Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan”** dan sasaran adalah **“Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai,**

**modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta”.**

Sasaran-sasaran strategis Dinas yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi yang dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan terkait dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

<b>Visi</b>	Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua
<b>Misi ke-2</b>	Menjadikan Jakarta, kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
<b>Tujuan</b>	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan
<b>Sasaran</b>	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta
<b>Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi</li> <li>2. Mempertahankan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap</li> <li>3. Meningkatkan Panjang Jalan yang Memiliki prasarana Jaringan Utilitas</li> <li>4. Meningkatkan cakupan Pencahayaan Kota</li> </ol>

**2.3 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

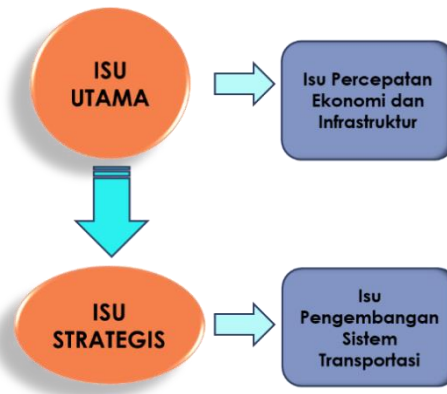
Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari kebijakan dan program mencakup hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Visi :Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua			
Misi ke-2 :Menjadikan Jakarta, kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta	1. Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi	1. Menambah panjang dan luas jalan beserta prasarana dan kelengkapannya
		2. Mempertahankan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap	2. Mempertahankan kondisi jalan mantap
		3. Meningkatkan Panjang Jalan yang Memiliki prasarana Jaringan Utilitas	3. Melengkapi Jalan dengan Prasarana Jaringan Utilitas
	Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	1. Penyediaan, Pengelola dan pengembangan pencahayaan kota yang hemat energi	1. Pengembangan dan perluasan pentatacahayaan jalan dan sarana umum yang hemat energi berbasis smart system

Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah

dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Isu Strategis diperinci menjadi 5 Isu Utama yang dipecah menjadi 18 Isu Strategis Daerah, dan 5 Upaya Utama (Panca Upaya Utama) Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan kedalam Kegiatan Strategis Daerah.



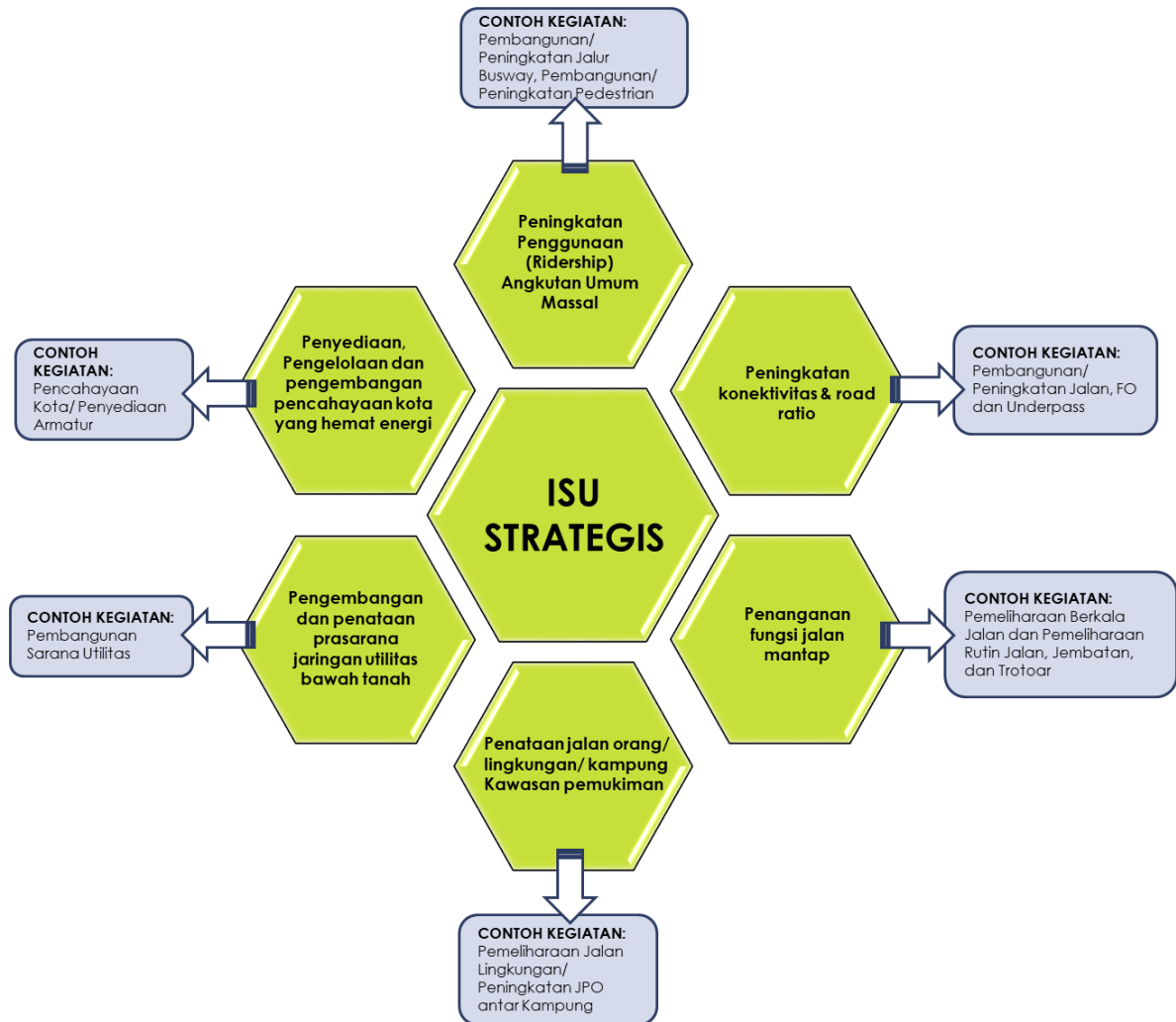
Gambar 5. Hubungan Isu Utama, dan Isu Strategis dalam RPJMD 2017-2022

Beberapa diantaranya diturunkan menjadi Isu Strategis yang diampu oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas:

1. Peningkatan Penggunaan (Ridership) Angkutan Umum Massal
2. Penyediaan, Pengelolaan dan pengembangan pencahayaan kota yang hemat energi
3. Pengembangan dan penataan prasarana jaringan utilitas bawah tanah
4. Penataan jalan orang/ lingkungan/ kampung Kawasan pemukiman
5. Penanganan fungsi jalan mantap
6. Peningkatan konektivitas & road ratio

Karena sifatnya yang strategis dan penting, Isu Strategis yang diampu oleh Perangkat Daerah haruslah selaras dan mendukung pelaksanaan program/kegiatan strategis nasional, ataupun program/kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dan pemenuhan terhadap Indikator-Indikator pembangunan yang ditetapkan baik secara nasional maupun internasional, serta menjawab isu-isu global yang terjadi.





Gambar 6 Hubungan Isu Strategis dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja

Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga apabila dijabarkan secara detail dalam kurun waktu 5 Tahun adalah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4 Penjabaran Tujuan, Sasaran, Program, indikator beserta targetnya dalam kurun waktu 5 tahun

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan		MLCI	60	63	60	61	62	63	63	
2	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta		Jumlah titik macet	155	0	140	116	85	47	0	
		1	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	Penambahan road ratio	7.1029%	7.1189%	0.0032%	0.0032%	0,0032%	0,0032%	
		1	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tak Sebidang/ Simpang Tak Sebidang/ Flyover/ Underpass	Jumlah FO/UP terbangun	49	61	0	0	2	4	6
		2	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan	Luas jalan yang dibangun dan ditingkatkan	0	3,208,800	641,760	641,760	641,760	641,760	641,760
		3	Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan	298	308	2	2	2	2	2
		4	Kegiatan Peningkatan Jalan Jalur Busway	Luas jalur busway yang ditingkatkan	0	208,013	41,603	41,603	41,603	41,603	41,603

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		5	Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan/Prasarana Jalan	Luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan bidang Bina Marga	0	105,000	18,000	18,000	33,000	18,000	18,000
		2	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	Penambahan luas jalur pejalan kaki	1,815,875	2,547,875	146,400	146,400	146,400	146,400	146,400
		1	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan	Penambahan luas jalur pejalan kaki	1,815,875	2,547,875	146,400	146,400	146,400	146,400	146,400
		2	Kegiatan Pembangunan Jalan Orang Tak Sebidang (JPO/TPO/Skywalk)	Jumlah JPO/TPO/Skywalk	324	350	7	5	4	6	4

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase kondisi jalan mantap pada jaringan jalan	95.88%	98.00%	96.00%	96.50%	97,00%	97,50%	98,00%
		1 Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Presentase kondisi jalan mantap	95.88%	98.00%	96.00%	96.50%	97,00%	97,50%	98,00%
		2 Kegiatan Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang	Simpang dan Jalan Tak Sebidang yang terpelihara	5 wilayah	5	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah
		3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, Trotoar dan Bangunan Pelengkapannya	Jalan, Jembatan, Trotoar dan Bangunan Pelengkapannya yang terpelihara	5 wilayah	5	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		4	Kegiatan Pemeliharaan Jalan di kompleks Instansi Vertikal	Jalan di kompleks Instansi Vertikal yang terpelihara	5 wilayah	5	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah
		5	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan/ Orang/ Saluran	Jalan Lingkungan/ Orang/ Saluran yang terpelihara	4,399,392	7,531,941	668,998	553,179	562,822	633,964	713,586
		4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Panjang Jalan yang memiliki prasarana jaringan utilitas	49,125	199.125	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		1	Kegiatan Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas	Panjang Jalan yang memiliki prasarana jaringan utilitas	49,125	199.125	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		5	Program Peningkatan Pencahayaan Kota	Persentase Cakupan Pencahayaan Kota	68.7	100	71.9	78.93	85.95	92.98	100,00

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		1	Pembayaran Biaya Penyambungan Daya Listrik	Waktu pembayaran biaya penyambungan daya listrik	1	5	1	1	1	1	1
		2	Pembangunan/Peningkatan kualitas pencahayaan kota	Jumlah titik pencahayaan kota	214,368	312,050	10,006	21,919	21,919	21,919	21.919
		3	Penanganan Limbah Pencahayaan Kota	waktu penanganan limbah pencahayaan kota	1	5	1	1	-	-	-
		4	Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)	Waktu pembayaran rekening Pencahayaan kota	12	60	12	12	12	12	12

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		5	Pengadaan Panel Pencahayaan Kota	Waktu Penyediaan Panel pencahayaan kota	1	5	1	1	-	-	-
		6	Pengadaan Peralatan Kerja Pencahayaan Kota	Waktu Penyediaan Peralatan kerja pencahayaan kota	1	5	1	1	1	-	-
		7	Pengadaan Material Konstruksi Pencahayaan Kota	Waktu Penyediaan set Material konstruksi Pencahayaan Kota	1	5	1	1	1	-	-

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		8	Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan Kota	Waktu Penyediaan Material pendukung pencahayaan kota	1	5	1	1	1	-	-
		6	Program Peningkatan Pencahayaan Kota	persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system	79.78	100	100	100	100	100	100
		1	Pengadaan Armatur dan Komponen Pencahayaan Kota	jumlah armatur dan komponen pencahayaan kota	171,033	312,050	53,341	21,919	21,919	21,919	21,919
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel			Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	0	91	-	-	100	91	91



# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4
		1 Pelaksanaan Pengukuran dan pengujian Laboraturium	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2 Akreditasi Unit Pengelolaan Penyelidikan , pengujian dan pengukuran dan Penelitian kebinamargaan (UP.PPP)	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4
		3 Pengadaan Alat Uji Laboraturium dan penyelidikan Lapangan di Bidang Kebinamargaan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4
		4 Pengadaan Perkakas Kerja Unit Alkal Bina Marga	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4
		5 Penyediaan Alat tulis Kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		6	Penyediaan Barang Cetakan	Indeks kepuasan pelayanan kantor		4	4	4	4	4
		7	Penyediaan jasa dan Pengadaan perlengkapan keamanan kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4
		8	Penyediaan jasa dan Pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4
		9	Penyediaan jasa telpon , air, listrik dan internet (TALI)	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4
		10	Penyediaan Makanan dan minuman	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4
		11	Penyediaan mesin fotocopy	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		12	pengelolaan helpdesk respon opini publik pengaduan masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4
		13	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4
		14	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	-	-	-	-
		15	Jasa Petugas Teknis dan Petugas Administrasi Kebinamargaan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4
		16	Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		17	Penyediaan dan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4
		18	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4
		19	Pengelolaan Data/Sistem Informasi Bina Marga	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4
		20	Pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	4

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	3	3	3
		1	Pengelolaan Penggunaan Kendaraan alat- alat berat/operator untuk mendukung bidang kebinamargaan	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	3	3	3

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2	pemeliharaan alat-alat berat beserta kelengkapannya	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	3	3	3	3
		3	Pengadaan alat- alat berat beserta kelengkapannya Dinas Bina Marga DKI Jakarta	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	3	3	3	3
		4	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	3	3	3	3
		5	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	3	3	3	3

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		6	Pengadaan Ban dan Accu Unit KDO/KDO Khusus/Alat Berat Bina Marga	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	3	3	3
		7	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	3	3	3
		8	Pengadaan KDO/KDO Khusus	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	3	3	3





No.	Sasaran	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			9	Penyediaan BBM Alat-Alat Pemeliharaan Jalan	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	3	3	3

Sumber: Renstra Dinas Bina Marga 2017-2022

## 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasi strategi organisasi, sedangkan kegiatan merupakan aktivitas operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah. Kinerja akan dapat diukur dengan dimulai dari kegiatan yang dilaksanakan, sejauh mana kegiatan itu sejalan dengan program, tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2020, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 yang menginstruksikan perubahan nomenklatur yang dipakai untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berpedoman pada peraturan tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan dan melakukan penyederhanaan terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dipakai untuk dokumen Rencana Kerja Tahun 2022. Selanjutnya pada akhir tahun 2020, terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 yang menjadi pedoman untuk merevisi renstra 2017 – 2022 sehingga jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Bina Marga di simplifikasi dengan tidak merubah target indikator untuk masing – masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun perubahan ini akan digunakan pada rencana kerja Dinas Bina Marga pada tahun 2022. Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
<b>DINAS BINA MARGA</b>	
A.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
A.1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
A.1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
A.1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan
A.1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
A.1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
A.1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
A.1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
A.1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
A.1.03.11.1.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
A.X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A.X.XX.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
A.X.XX.01.1.02.01	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
A.X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
A.X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
A.X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
A.X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A.X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
A.X.XX.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material
A.X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
A.X.XX.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
A.X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
A.X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
A.X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
A.X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
A.X.XX.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
A.X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
A.X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
A.X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>SUKU DINAS BINA MARGA KOTA – JAKPUS</b>	
A.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
A.1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan
A.1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
A.1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
A.X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A.X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
A.X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
A.X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
A.X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
A.X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
A.X.XX.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
<b>SUKU DINAS BINA MARGA KOTA – JAKUT</b>	
A.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
A.1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan
A.1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
A.1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
A.X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A.X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
A.X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
A.X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
A.X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
A.X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
A.X.XX.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>SUKU DINAS BINA MARGA KOTA – JAKBAR</b>	
A.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
A.1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan
A.1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
A.1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
A.X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A.X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
A.X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
A.X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
A.X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
A.X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
A.X.XX.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
A.X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>SUKU DINAS BINA MARGA KOTA – JAKSEL</b>	
A.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
A.1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan
A.1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
A.1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
A.X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A.X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
A.X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
A.X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
A.X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
A.X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
A.X.XX.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
A.X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>SUKU DINAS BINA MARGA KOTA – JAKTIM</b>	
A.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
A.1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan
A.1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
A.1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
A.1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan
A.X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A.X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
A.X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
A.X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
A.X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
A.X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A.X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
A.X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
A.X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
A.X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: Sistem akun.jakarta.go.id

Dinas Bina Marga sesuai tabel di atas, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 menggunakan 3 (tiga) program kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Sedangkan Pada Suku Dinas Bina Marga 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta program yang digunakan pada dasarnya menggunakan program yang similar dengan Dinas, karena Suku Dinas merupakan perpanjangan dari Dinas Bina Marga, adapun program yang digunakan oleh Suku Dinas Bina Marga 2 (dua) Kota Administrasi antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Jalan

## 2.5 **PENETAPAN KINERJA/ PENENTAPAN KINERJA TAHUNAN**

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang telah disusun, maka Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Bina Marga TA 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2022	PERGESERAN KE 5 APBD 2022
A.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2,064,400,448,036	1,738,251,975,303
A.1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	432,803,388	432,803,388
A.X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	493,384,193,120	458,771,966,292

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>APBD 2022</b>	<b>PERGESERAN KE 5 APBD 2022</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2,558,217,444,544</b>	<b>2,197,456,744,983</b>

Anggaran murni Dinas Bina Marga adalah sebesar Rp 2,558,217,444,544,- namun seiring dengan proses pelaksanaan pekerjaan dan maka pada akhir triwulan 3 Tahun 2022 Anggaran Dinas Bina Marga ditetapkan menjadi Rp 2,197,456,744,983,- melalui Pergeseran ke 5 APBD 2022 yang disahkan dengan Peraturan Gubernur No 62 Tahun 2022.



Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang telah disusun, maka Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah menyusun target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Keterangan
					Tahunan	
<b>Sasaran Strategis</b>						
1	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan, dan Terjangkau Bagi Semua Masyarakat Jakarta	Jumlah titik macet	e-SAKIP	Jumlah titik dengan kecepatan kendaraan pada ruas jaringan Jalan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) km/jam	0	titik
2	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Most Livable City Index (MLCI)/Indeks Kota Layak Huni	e-SAKIP	Studi MLCI mengukur prinsip-Prinsip Kota Layak Huni. Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya. Hasil studi ini sifatnya adalah "snapshot" ( <a href="http://iapindonesia.org">http://iapindonesia.org</a> )	63	nilai
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output).	91	Persentase
4	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (KSD Nomor 10)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (Nomor 10)	100	persen



# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Keterangan
					Tahunan	
5	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (Nomor 28)	100	persen
6	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD Nomor 29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	100	persen
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (Nomor 30)	100	persen
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (KSD Nomor 36)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (Nomor 36)	100	persen
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	100	persen
10	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (KSD Nomor 48)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (Nomor 48)	100	persen
11	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyelesaian Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (KSD Nomor 58)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (Nomor 58)	100	persen



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Keterangan
					Tahunan	
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	100	persen
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan (KSD Nomor 66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan (Nomor 66)	100	persen
14	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	100	persen
<b>Sasaran Khusus</b>						
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100	Persen
16	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Strategi Komunikasi	a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2021.	100	Persen



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Keterangan
					Tahunan	
17	Peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Indikator Khusus	Jumlah surat masuk sama dengan jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari sama. pengecekan dan pelaporan dapat monitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk" / Surat keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi Keluar yang ada pada e-office. diperlukan penentuan penanggung jawab akun e-office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi/terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun e-office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut	100	Persentase
18	Peningkatan penggunaan e-produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Indikator Khusus	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google Sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD	100	Persentase
19	Penataan jalur pejalan kaki dengan konsep Complete Street	Panjang jalur pejalan kaki dengan konsep Complete Street	Indikator Khusus	Definis : Penambahan luasan trotoar dan bangunan pelengkap jalan untuk pejalan kaki	34450	Luas trotoar m2



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Keterangan
					Tahunan	
20	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Indikator Khusus	<p>Definisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Formula Pengukuran :                      Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = &gt;90-100; A = &gt;80-90; BB = &gt;70-80; B = &gt;60-70; CC = &gt;50-60; C = &gt;30-50; D = 0-30</p>	95	Nilai
21	Tercapainya proses penurunan kabel udara di lokasi SJUT yang telah terbangun oleh PT Jakpro atau PD Sarana Jaya	Persentase progres turunnya kabel udara pada lokasi SJUT yang telah terbangun oleh PT Jakpro atau PD Sarana Jaya	Indikator Khusus	Definisi : Penurunan kabel udara terhadap SJUT yang telah terbangun oleh PT Jakpro atau PD Sarana Jaya	100	Persentase
22	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Prediklat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Indikator Khusus	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat (nilai:91)	91	AA (91)
23	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 atau Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase capaian penyerapan anggaran PEN atau persentase	Indikator Khusus	Definisi : Penyelesaian Pembangunan Jembatan Akses Rusun Pesakih	100	Persentase



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Keterangan
					Tahunan	
		penyelesaian output program PEN				
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan	Indikator Khusus	Definisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK)  Formula Pengukuran : WTP = 3(100%), WDP = 2(75%), TW = 1(50%), TMP = 0(25%)	3	Predikat
<b>Sasaran Operasional</b>						
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	Persen
26	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	Persen
27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektorat	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100	Persen

Sumber: Sistem E-Pegawai

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*)/Penetapan Kinerja pada setiap tahunnya. Penetapan Kinerja menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Penetapan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis 2017-2022 yang merupakan komitmen segenap karyawan dan pejabat di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya, sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dan dalam rangka perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya dapat mengacu pada Penetapan Kinerja 2022 ini.

Penetapan Kinerja Tahun 2022 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/kegiatan, dan jumlah anggaran dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta merupakan tolak ukur (acuan/target) dalam melakukan pengukuran capaian kinerja. Dengan Program sebagai berikut.

Tabel 7. Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga Tahun 2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Semua Masyarakat Jakarta Most Livable City Index (MLCI)/Indeks Kota Layak Huni	63 poin	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91 %	

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan
3	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan, dan Terjangkau Bagi Semua Masyarakat Jakarta	Jumlah titik macet	0 titik	

Sumber: Sistem E-sakip

Untuk target Indikator Kinerja pada Tahun 2022 yang tertuang pada RPJMD, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta merupakan tolak ukur (acuan/target) dalam melakukan pengukuran capaian kinerja eselon 3 dapat di lihat pada Tabel 9.

Tabel 8. Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi	Penambahan Road Ratio	%	0,0032
		Penambahan luas jalur pejalan kaki	m <sup>2</sup>	146.400
2	Mempertahankan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Jalan Mantap	%	98
3	Meningkatkan panjang yang memiliki prasarana jaringan utilitas	Panjang Jalan yang memiliki prasarana jaringan utilitas	m <sup>2</sup>	30.000
4	Penyediaan, Pengelolaa dan pengembangan pencahayaan kota yang hemat energi	Presentase Pencahayaan Kota	%	100
		Pencahayaan Kota Hemat Energi berbasis Smart System	%	100
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	indeks kepuasan pelayanan kantor	Poin	4
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Poin	3
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan pelayanan Laboratorium di Bidang Kebnamargaan	Poin	4

Sumber: RPJMD

Rencana peningkatan pelayanan jaringan jalan perkotaan melalui pemeliharaan jalan perkotaan yang efektif dan efisien serta peningkatan kapasitas jalan perkotaan berkeselamatan yang mendukung keterpaduan transportasi massal perkotaan, diantaranya:

- Revitalisasi jaringan jalan perkotaan;
- Penataan simpang sebidang untuk mengurangi kemacetan jalan di persimpangan;
- Dukungan jalan pada pengembangan moda transportasi angkutan massal;
- Pengembangan jaringan jalan baru di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan ROW jalan eksisting berupa elevated/submerged road untuk meminimalisir pengadaan lahan yang biayanya sangat tinggi di perkotaan;
- Perbaikan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki;
- Optimalisasi metode pembangunan simpang tak sebidang (fly over) terutama lintasan kereta dan Kelembagaan api dengan pemanfaatan lahan seminimal mungkin

Adapun sebagai salah satu dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2019 yang mengakibatkan kondisi keuangan Provinsi DKI yang kurang stabil, maka pada tahun 2019 Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) Provinsi DKI Jakarta mengajukan usulan revisi target RPJMD kepada seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk target Indikator Kinerja Dinas Bina Marga Adapun target revisi RPJMD dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 9. Revisi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Revisi Target RPJMD
1	Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi	Penambahan Road Ratio	%	0,0032	0.0031
		Penambahan luas jalur pejalan kaki	m <sup>2</sup>	146.400	72.774
2	Mempertahankan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Jalan Mantap	%	98	96



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Revisi Target RPJMD
3	Meningkatkan panjang yang memiliki prasarana jaringan utilitas	Panjang Jalan yang memiliki prasarana jaringan utilitas	m <sup>2</sup>	30.000	29.313
4	Penyediaan, Pengelolaa dan pengembangan pencahayaan kota yang hemat energi	Presentase Pencahayaan Kota	%	100	100
		Pencahayaan Kota Hemat Energi berbasis Smart System	%	100	100
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	3	3
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan pelayanan Laboratorium di Bidang Kebnamargaan	Indeks	4	4

*Sumber: Revisi RPJMD*

Uraian lengkap mengenai Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat secara lengkap pada Formulir Penetapan Kinerja pada lampiran I, dan Formulir Rencana Kinerja Tahunan pada lampiran II LKIP ini, sesuai Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## 2.7 KEGIATAN STRATEGI DAERAH 2022

Untuk pelaksanaan kegiatan strategis daerah (KSD), Dinas Bina Marga mengampu 11 KSD yang terdiri dari 1 KSD Utama dan 10 KSD Tambahan. Untuk KSD Utama, Dinas Bina Marga mengampu KSD nomor 73, serta untuk KSD Tambahan Dinas Bina Marga mengampu KSD nomor 10, 28, 29, 30, 36, 39, 48, 58, 61, 66, dan 73.

Penjelasan terkait KSD Utama dan Tambahan yang diampu oleh Dinas Bina Marga dalam rangka penuntasan Isu Strategis Daerah diuraikan pada Tabel 10. sebagai berikut:

Tabel 10 KSD yang Diampu oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

No	Nama Kegiatan	Kategori
1	KSD 10	Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional
2	KSD 28	Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)
3	KSD 29	Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko
4	KSD 30	Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT)
5	KSD 36	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda
6	KSD 39	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA
7	KSD 48	Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan
8	KSD 58	Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik
9	KSD 61	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan
10	KSD 66	Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan
11	KSD 73	Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian



## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Terkait dengan target perjanjian kinerja organisasi pada Dinas Bina Marga pada Tahun 2022, Dinas Bina Marga mempunyai Perjanjian Kinerja dengan beberapa indikator yaitu sebanyak 3 indikator, dengan target dan realisasi masing-masing sebagai berikut:

Tabel 11. Target dan realisasi Perjanjian Kinerja Utama Dinas Bina Marga

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Ket
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Masyarakat Jakarta Most Livable City Index (MLCI)/Indeks Kota Layak Huni	63 poin	N/A	Belum ada hasil sampai dengan laporan ini dibuat
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91 %	91.98%	Tercapai
3	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan, dan Terjangkau Bagi Semua Masyarakat Jakarta	Jumlah titik macet	0 titik	0 Titik	Tercapai

*Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga 2022*

Sedangkan untuk Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga TA 2022 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Ratio Capaian
					Tahunan	Tahunan		
<b>Sasaran Strategis</b>								
1	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan, dan Terjangkau Bagi Semua Masyarakat Jakarta	Jumlah titik macet	e-SAKIP	Jumlah titik dengan kecepatan kendaraan pada ruas jaringan Jalan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) km/jam	0	0	Titik	100%
2	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Most Livable City Index (MLCI)/Indeks Kota Layak Huni	e-SAKIP	Studi MLCI mengukur prinsip-Prinsip Kota Layak Huni. Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya. Hasil studi ini sifatnya adalah "snapshot" ( <a href="http://iapindonesia.org">http://iapindonesia.org</a> )	63	N/A	Nilai	Nilai belum bisa didapat sampai dengan laporan ini dibuat
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output).	91	91.98	Persentase	101%
4	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (KSD Nomor 10)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (Nomor 10)	100	100	Persen	100

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Ratio Capaian
					Tahunan	Tahunan		
5	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (Nomor 28)	100	85	Persen	85%
6	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD Nomor 29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	100	99.44	Persen	99.44%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (Nomor 30)	100	100	Persen	100%
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (KSD Nomor 36)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (Nomor 36)	100	100	Persen	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	100	100	persen	100%

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Ratio Capaian
					Tahunan	Tahunan		
		(AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)						
10	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (KSD Nomor 48)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (Nomor 48)	100	100	Persen	100%
11	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyelesaian Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (KSD Nomor 58)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (Nomor 58)	100	95	Persen	95%
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	100	100	Persen	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan (KSD Nomor 66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan (Nomor 66)	100	99.93	Persen	99.93%
14	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah	Persentase penyelesaian Peningkatan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai	100	99.98	persen	99.98%

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Ratio Capaian
					Tahunan	Tahunan		
	lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73)		Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)				
<b>Sasaran Khusus</b>								
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100	100	Persen	100%
16	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Strategi Komunikasi	a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2021.	100	100	Persen	100%
17	Peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Indikator Khusus	Jumlah surat masuk sama dengan jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari sama. pengecekan dan pelaporan dapat monitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk" / Surat keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi Keluar yang ada pada e-office. diperlukan penentuan penanggung jawab akun e-office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi/terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun e-office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut	100	100	Persentase	100%



# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Ratio Capaian
					Tahunan	Tahunan		
18	Peningkatan penggunaan e-produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Indikator Khusus	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google Sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD	100	100	Persentase	100%
19	Penataan jalur pejalan kaki dengan konsep Complete Street	Panjang jalur pejalan kaki dengan konsep Complete Street	Indikator Khusus	Definisi : Penambahan luasan trotoar dan bangunan pelengkap jalan untuk pejalan kaki	34450	70517	Luas trotoar m2	204%
20	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Indikator Khusus	<p>Definisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Formula Pengukuran :                      Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = &gt;90-100; A = &gt;80-90; BB = &gt;70-80; B = &gt;60-70; CC = &gt;50-60; C = &gt;30-50; D = 0-30</p>	95	97,9	Nilai	103%
21	Tercapainya proses penurunan kabel udara di lokasi SJUT yang	Persentase progres turunnya kabel udara pada	Indikator Khusus	Definisi : Penurunan kabel udara terhadap SJUT yang telah terbangun oleh PT Jakpro atau PD Sarana Jaya	100	100	Persentase	100%

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Ratio Capaian
					Tahunan	Tahunan		
	telah terbangun oleh PT Jakpro atau PD Sarana Jaya	lokasi SJUT yang telah terbangun oleh PT Jakpro atau PD Sarana Jaya						
22	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Prediklat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Indikator Khusus	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat (nilai:91)	91	92.91	AA (91)	102%
23	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 atau Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase capaian penyerapan anggaran PEN atau persentase penyelesaian output program PEN	Indikator Khusus	Definisi : Penyelesaian Pembangunan Jembatan Akses Rusun Pesakih	100	100	Persentase	100%
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan	Indikator Khusus	Definisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK)  Formula Pengukuran : WTP = 3(100%), WDP = 2(75%), TW = 1(50%), TMP = 0(25%)	3	3	Predikat	100%
<b>Sasaran Operasional</b>								
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	Persen	100%

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Ratio Capaian
					Tahunan	Tahunan		
		pengaduan masyarakat						
26	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	Persen	100%
27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektorat	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100	100	Persen	100%

*Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga 2022*

Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga terbagi menjadi 3 sasaran, yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Operasional dan Sasaran Khusus. Dari Ketiga sasaran tersebut, hampir seluruh realisasi telah tercapai dengan baik.



Tabel 13. Pagu Program Pendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Utama Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian	Progra m	Pagu APBD 2022	Pagu P5-APBD 2022	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	%					
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Semua Masyarakat Jakarta Most Livable City Index (MLCI)/Indeks Kota Layak Huni	poin	63	N/A	Nilai belum bisa didapat sampai dengan laporan ini dibuat	3	2,558,217,44 4,544	2,197,456,744 ,983	1,883,792, 672,323	85.69%
2	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan, dan Terjangkau Bagi Semua Masyarakat Jakarta	Jumlah titik macet Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	titik	0			1	432,803,388	432,803,388	394,030,31 0	91.04%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	91			2	493,816,996, 508	458,771,580,4 00	440,603,40 1,228	96.04%

Anggaran program yang dianggarkan untuk mencapai target MLCI adalah sebesar Rp 2,197,456,744,983 pada fase pergeseran ke 5 APBD 2022 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1,883,792,672,323,- yaitu 85.69% dari anggaran yang telah disediakan. Sedangkan untuk untuk mencapai target Jumlah titik macet adalah sebesar Rp. 432,803,388,- pada fase pergeseran ke 5 APBD 2022 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 394,030,310,- yaitu 91.04 % dan untuk mencapai perkin Presentase Kualitas Pelaksanaan anggaran yang dibutuhkan anggaran sebesar Rp 440,603,401,228,- yaitu 96.04% dari anggaran pergeseran ke 5 APBD TA 2022 yaitu sebesar Rp 458,771,400,-.

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU, terdiri dari :

**Capaian IKU 1: Masyarakat Jakarta Most Livable City Index (MLCI) / Indeks Kota Layak Huni**

Iku pertama Dinas Bina Marga adalah Masyarakat Jakarta Most Livable City Index (MLCI) / Indeks Kota Layak Huni. Iku ini baru diterapkan pada tahun 2022, setelah pembahasan detail terkait cascading di Tahun 2020, pada Tahun 2021, IKU pertama Dinas Bina Marga adalah tingkat layanan sarana dan prasarana Bina Marga namun pada saat pembahasan Bersama Bappeda, dirasa IKU tingkat layanan sarana dan prasarana Bina Marga terlalu teknis dan kurang tepat sebagai turunan dari Visi Misi DKI Jakarta, oleh karena itu disepakati IKU Dinas Bina Marga adalah MLCI . IKU ini mencakup kegiatan Dinas Bina Marga dalam skala makro.

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU ini adalah dengan menghitung Studi MLCI mengukur prinsip-Prinsip Kota Layak Huni 1) Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik, dsb) 2) Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan, dsb) 3) Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat 4) Keamanan 5) Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota 6) Sanitasi. Hasil studi ini sifatnya adalah “snapshot” (<http://iapindonesia.org>).

Metode Pengukuran Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya. (Survei dan perhitungan dilakukan oleh IAP).

Namun sampai dengan laporan ini dibuat, hasil survey pengukuran MLCI belum disampaikan ke PemProv DKI Jakarta.

**Capaian IKU 2: Jumlah titik macet**

Iku Kedua Dinas Bina Marga adalah Jumlah Titik Macet. Pada dasarnya IKU ini adalah IKU yang diampu oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Bina Marga berperan sebagai *supporting system* dimana Program yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga mendukung dalam kesuksesan Dinas Perhubungan dalam mencapai target IKU Jumlah Titik Macet ini.

Pada perumusan Definisi operasionalnya, IKU ini dihitung dengan cara menghitung Jumlah titik dengan kecepatan kendaraan pada ruas jaringan Jalan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) km/jam.

Tabel 14. Tabel Perbandingan Target dan Capaian Realisasi IKU Jumlah Titik Macet

TAHUN ANGGARAN	TARGET TITIK MACET	REALISASI TITIK MACET	CAPAIAN %
2018	140	140	100
2019	116	116	100
2020	85	85	100
2021	47	47	100
2022	0	0	100

Sumber: Dokumen RPJMD Dinas Perhubungan 2017-2022

Program-Program yang mendukung dalam keberhasilan IKU Jumlah titik macet ini adalah:

♣ **Program Penyelenggaraan Jalan**

Hampir seluruh kegiatan fisik Dinas Bina Marga menggunakan program Penyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Program ini mencakup semua kegiatan pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan fisik yang ada di Dinas Bina Marga, antara lain: Jalan, Jembatan, Trotoar, Utilitas dan bangunan pelengkapya

Berikut adalah data capaian program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tercapainya IKU kedua ini dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Dinasnya.

Tabel 15. Tabel Rekapitulasi capaian per Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Dinas Bina Marga yang terkait dengan capaian IKU Jumlah Titik Macet Program Penyelenggaraan Jalan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata Capaian
<b>DINAS BINA MARGA</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	140%
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	100%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis z Jalan dan Jembatan	100%
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	101%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata Capaian
	Pembangunan Jalan	100%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	176%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	115%
	Pembangunan Jembatan	118%
<b>Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%
	Pembangunan Jalan	100%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	100%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	100%
<b>Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%
	Pembangunan Jalan	100%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	100%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	100%
<b>Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%
	Pembangunan Jalan	100%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	100%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	100%
<b>Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%
	Pembangunan Jalan	100%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	100%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	100%
<b>Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%
	Pembangunan Jalan	100%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	100%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	100%
	Pembangunan Jembatan	100%

*Sumber: Sistem E-Sakip*

### **Capaian IKU 3: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

IKU Ketiga Dinas Bina Marga adalah Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Program yang mendukung kesuksesan IKU ini terdiri dari Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. Adapun Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, pada fase APBDP kegiatannya dimatikan dalam rangka menyesuaikan kondisi keuangan Provinsi DKI Jakarta yang belum stabil akibat dari Pandemi Covid -19.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

- **Penyerapan Anggaran.** Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran  $\geq 80\%$ . Apabila serapan anggaran di bawah  $< 80\%$  maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
- **Efisiensi** adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- **Pencapaian output** adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

- Serapan Anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%  
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)
- Serapan Anggaran  $< 80\%$  dan output  $< 100\%$   
Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%)
- Serapan Anggaran  $\geq 80\%$ , namun output  $< 100\%$



Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)

Tabel 16. Persentase Kualitas Anggaran Dinas Bina Marga

SKPD/UKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
	Rp.	Rp.
DINAS BINA MARGA	1.732.390.840.875	1.430.245.470.886
SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS	78.328.334.549	75.758.210.901
SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKUT	87.048.792.183	85.216.668.414
SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	109.015.017.505	107.031.441.997
SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL	93.583.295.345	91.653.230.079
SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	97.537.794.089	93.887.650.046
<b>TOTAL</b>	<b>2,197,904,074,546</b>	<b>1,883,792,672,323</b>
<b>Efisiensi</b>		<b>314,111,402,223</b>
<b>Kualitas Penggunaan Anggaran</b>		<b>85.69</b>

Sumber: E-Monev

Tabel 17. Tabel Rekapitulasi capaian per Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Dinas Bina Marga yang terkait dengan capaian IKU Jumlah Titik Macet Program Penyelenggaraan Jalan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata Capaian
<b>DINAS BINA MARGA</b>		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	167%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
	Penyediaan Bahan/Material	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Bina Marga dan Listrik	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata Capaian
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	100%
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	100%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100%
<b>Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	167%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
	Penyediaan Bahan/Material	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Bina Marga dan Listrik	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%
<b>Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	167%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
	Penyediaan Bahan/Material	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Bina Marga dan Listrik	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
<b>Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	167%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
	Penyediaan Bahan/Material	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata Capaian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Bina Marga dan Listrik	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
<b>Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	167%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
	Penyediaan Bahan/Material	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Bina Marga dan Listrik	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120%
<b>Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	167%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
	Penyediaan Bahan/Material	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Bina Marga dan Listrik	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%

Sumber: sistem E-Sakip

### 3.2. **CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KSD merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD dalam memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab KSD.

Penanggung Jawab KSD memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan KSD berdasarkan daftar KSD yang ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1107 tahun 2019 terdapat 73 Daftar Kegiatan Strategis Daerah. Kegiatan Strategis Daerah yang di ampu oleh Dinas Bina Marga ada 11 KSD yang terdiri dari 1 KSD utama yaitu KSD 73 mengenai Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian, dan 10 KSD Tambahan. Target KSD dievaluasi setiap triwulan sesuai dengan target yang ditetapkan pada rapat pembahasan diawal tahun anggaran. Evaluasi capaian KSD dilaporkan melalui halaman situs <https://ksd.jakarta.go.id/login>. Adapun tampilan monitoring ksd sebagaimana berikut:



Gambar 7 Tampilan depan sistem Monev KSD



Tabel 18. Tabel target dan realisasi KSD TA 2022 Dinas Bina Marga

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	TARGET KSD				REALISASI KSD			
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A
2	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Nomor (10)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Nomor (10)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Nomor (28)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Nomor (28)	N/A	100%	100%	N/A	N/A	80%	90%	N/A
3	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) Nomor (30)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) Nomor (30)	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	98.33%	N/A
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda Nomor (36)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda Nomor (36)	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	TARGET KSD				REALISASI KSD			
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan Nomor (48)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan Nomor (48)	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%

### 3.3 **CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN**

Pada tahun 2020, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 yang menginstruksikan perubahan nomenklatur yang dipakai untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pada akhir tahun 2020, terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 yang menjadi pedoman untuk merevisi renstra 2017 – 2022 sehingga jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Bina Marga di simplifikasi dengan tidak merubah target indikator untuk masing – masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun perubahan ini digunakan pada rencana kerja Dinas Bina Marga pada tahun 2022.

Keselaran antara program dan indikator program pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 3. 16 dibawah ini. Pada tabel tersebut dapat dilihat perbedaan pada Renstra tahun 2022 yang menggunakan 3 Program dan Rencana Kerja tahun 2022 yang menggunakan 6 Program Kegiatan.

Perbedaan terdapat pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengampu 2 indikator pencahayaan kota dimana pada renstra 2022 digabung kedalam program Penyelenggaraan Jalan. Pada Rencana Kerja 2022 digunakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dikarenakan merupakan program yang paling mendekati untuk dapat mengampu sub kegiatan pembangunan pencahayaan kota walaupun program tersebut berasal dari Dinas Perhubungan. Namun pada saat perumusan revisi renstra 2017 – 2022, disarankan akan lebih baik apabila program yang digunakan oleh Dinas Bina Marga tidak mengambil dari program yang dimiliki oleh SKPD lain, sehingga pada perumusan revisi renstra 2017 – 2022 untuk 2 indikator pembangunan pencahayaan kota masuk kedalam program Penyelenggaraan Jalan.

Adapun untuk Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Rencana Kerja 2021 juga menggunakan Program dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo). Sehingga pada penyusunan revisi renstra 2017 – 2022, kedua indikator program tersebut dimasukkan kedalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 32 dibawah ini :



Tabel 19. Keselarasan Program Renstra dan Program Renja Perangkat Daerah

Kode	Renstra-PD Tahun 2021		Renja-PD Tahun 2021		Renja-PD Tahun 2022	
	Program	Indikator Program	Program	Indikator Program	Program	Indikator Program
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.1.03.10	Penyelenggaraan Jalan	Penambahan Road Ratio	Penyelenggaraan Jalan	Penambahan Road Ratio	Penyelenggaraan Jalan	Penambahan Road Ratio
		Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m)		Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m)		Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m)
		Penambahan Luas jalur pejalan kaki		Penambahan Luas jalur pejalan kaki		Penambahan Luas jalur pejalan kaki
		Persentase Kondisi Jalan Mantap		Persentase Kondisi Jalan Mantap		Persentase Kondisi Jalan Mantap
		Persentase cakupan pencahayaan kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase cakupan pencahayaan kota	Persentase cakupan pencahayaan kota	Persentase cakupan pencahayaan kota
		persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system		persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system	persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system	
A.1.03.11	Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan pelayanan Laboratorium di Bidang Kebnamargaan	Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan pelayanan kantor
A.X.XX.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kantor	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kantor	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kantor
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		indeks kepuasan pelayanan



# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



Kode	Renstra-PD Tahun 2021		Renja-PD Tahun 2021		Renja-PD Tahun 2022	
	Program	Indikator Program	Program	Indikator Program	Program	Indikator Program
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kendaraan operasional
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	indeks kepuasan pelayanan kantor		indeks kepuasan pelayanan kantor
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	indeks kepuasan pelayanan kantor		

Sumber: Tabel Cascading 2021 dan Smart Budgeting 2021 dan 2022



Tabel 20. Perbandingan Target dan realisasi IKU Dinas Bina Marga TA 2022 pada level program

No	Program	APBD	APBDP	Persentase Target terhadap APBD	Realisasi Anggaran TW IV	Realisasi Keuangan Program Dinas Bina Marga TW IV	Persentase capaian realisasi terhadap target	Capaian Indikator
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2,064,400,448,036	1,738,699,690,758	100.00%	1,442,443,438,330	82.96%	82.96%	100%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	432,803,388	432,803,388	100.00%	394,030,310	91.04%	91.04%	100%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	493,384,193,120	458,771,580,400	100.00%	440,603,401,228	96.04%	96.04%	167%
<b>Total</b>		<b>2,558,217,444,544</b>	<b>2,197,904,074,546</b>	<b>100%</b>	<b>1,883,440,869,868</b>	<b>85.69%</b>	<b>85.69%</b>	<b>100%</b>

Sumber: E-Monev

Berikut data Perbandingan Target dan realisasi IKU Dinas Bina Marga pada level kegiatan TA 2022 pada tabel dibawah ini.

Tabel 21 .Perbandingan Target dan realisasi IKU Dinas Bina Marga pada level kegiatan TA 2022

Sasaran strategis	Indikator sasaran	Program	Pagu	Pagu APBDP	Realisasi	Capaian Terhadap APBDP	Kegiatan	Pagu	Pagu APBDP	Realisasi	Capaian Terhadap APBDP
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	MLCI	Program Penyelenggaraan Jalan	2,064,400,448,036	1,738,699,690,758	1,442,443,438,330	82.96%	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	2,064,400,448,036	1,738,699,690,758	1,442,443,438,330	82.96%
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta	Jumlah titik macet	Program Penyelenggaraan Jalan	2,064,400,448,036	1,738,699,690,758	1,442,443,438,330	82.96%	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	2,064,400,448,036	1,738,699,690,758	1,442,443,438,330	82.96%
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	432,803,388	432,803,388	394,030,310	91.04%	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	432,803,388	432,803,388	394,030,310	91.04%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	493,384,193,120	458,771,580,400	440,603,401,228	96.04%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169,245,471,754	148,302,852,764	136,197,033,906	91.84%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	17,413,815,141	21,838,350,800	21,525,250,892	98.57%
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21,706,787,575	17,493,445,054	17,110,279,198	97.81%

# DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



Sasaran strategis	Indikator sasaran	Program	Pagu	Pagu APBDP	Realisasi	Capaian Terhadap APBDP	Kegiatan	Pagu	Pagu APBDP	Realisasi	Capaian Terhadap APBDP
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255,761,068,115	244,826,982,728	240,794,716,948	98.35%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29,257,050,535	26,309,949,054	24,976,120,284	94.93%
<b>TOTAL</b>								<b>2,558,217,444,544</b>	<b>2,197,904,074,546</b>	<b>1,883,440,869,868</b>	<b>85.69%</b>

Sumber: E-Monev

Sebagai salah satu dampak Pandemi Covid-19, kondisi keuangan Provinsi DKI Jakarta masih belum stabil. Oleh karena itu, pada fase Pergeseran 5 APBD 2022 di Oktober 2022, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 360,313,369,998,- dari anggaran murni sebesar Rp 2,558,217,444,544,- menjadi Rp 2,197,904,074,546,- pada akhir tahun anggaran 2022, serapan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mencapai angka Rp 1,883,440,869,868 ,- yaitu sebesar 85.69 % dari nilai Pergeseran 5 APBD 2022



### 3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Berikut data Target dan realisasi IKU Dinas Bina Marga TA 2022 dengan beberapa tahun terakhir pada tabel dibawah ini.

Tabel 22. Perbandingan Target dan realisasi IKU Dinas Bina Marga TA 2022 dengan beberapa tahun terakhir

No	IKU	Satuan	Target					Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>MLCI</b>	%	60	61	62	63	63	-	-	-	-	N/A
	<b>Jumlah titik macet</b>	titik	140	116	85	47	0	140	116	85	47	0
	Penambahan Road Ratio	%	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0036	0.0032	0	0.00321	0.0088
	Penambahan Luas jalur pejalan kaki	m2	146,400	146,400	146400	146400	146400	282,465	326,665	8,851.41	53,541.40	110,449
	Persentase Kondisi Jalan Mantap	%	96	96.5	97	97.5	98	96.16	96.6	92.18	96.77	97
	Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m)	m	30000	30000	30000	30000	30000	48125	34162	9,725	4,200	32,266
	Persentase cakupan pencahayaan kota	%	71.9	78.93	85.95	92.98	100	81.19	85.4	82.99	86.78	100
	persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system	%	100	100	100	100	100	92.51	92.44	100	100	100
	Indeks kepuasan pelayanan Laboratorium di Bidang Kebinamargaan	poin	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4
	<b>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran</b>	%	-	-	91	91	91	-	-	93,93	92.63	91.98
	indeks kepuasan pelayanan kantor	poin	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4

Sumber: Sistem Monev Bappeda

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja Dinas Bina Marga pada tahun 2022 dengan target Renstra murni tahun 2022 maka dapat dikatakan kinerja Dinas Bina Marga kurang maksimal karena terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Dinas Bina Marga yang tercapai. Adapun penyebab tidak tercapainya dua indikator Renstra Dinas Bina Marga adalah karena terjadinya gelombang pandemic Covid-19 pada tahun 2020. Semenjak kejadian luar biasa tersebut pada tahun 2020 sampai dengan saat ini tahun 2022, capaian kinerja Dinas Bina Marga untuk Indikator Penambahan Luas Pejalan Kaki dan Presentase Kondisi Jalan Mantap tidak dapat mencapai target yang ditentukan pada dokumen Renstra dikarenakan adanya pemotongan anggaran terhadap kedua aktivitas yang mengampu indikator tersebut. Untuk Indikator Penambahan Road Ratio pada tahun 2020, target juga tidak dapat tercapai dengan baik, namun capaian pada tahun 2022 target indikator tersebut melebihi target.

Pada tahun 2020, Ketika terjadi gelombang Pandemic Covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi keuangan DKI Jakarta, maka seluruh anggaran pembangunan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dialihkan menjadi anggaran darurat Covid-19, sehingga seluruh kegiatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Akibat dari kebijakan itu, maka pada pertengahan tahun 2020, Bappeda berinisiasi untuk melakukan revisi target Renstra.

**3.5 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI**

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja Dinas Bina Marga sampai dengan tahun 2022 dengan total target Renstra murni tahun 2022 maka dapat dikatakan kinerja Dinas Bina Marga kurang maksimal karena terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Dinas Bina Marga yang tercapai. Adapun penyebab tidak tercapainya dua indikator Renstra Dinas Bina Marga adalah karena terjadinya gelombang pandemic Covid-19 pada tahun 2020. Semenjak kejadian luar biasa tersebut pada tahun 2020 sampai dengan saat ini tahun 2022, capaian kinerja Dinas Bina Marga untuk Indikator Penambahan Luas Pejalan Kaki dan Presentase Kondisi Jalan Mantap tidak dapat mencapai target yang ditentukan pada dokumen Renstra dikarenakan adanya pemotongan anggaran terhadap kedua aktivitas yang mengampu indikator tersebut. Untuk Indikator Penambahan Road Ratio pada tahun 2020, target juga tidak dapat tercapai dengan baik, namun capaian pada tahun 2022 target indikator tersebut melebihi target.

Berikut data Perbandingan Sasaran Strategis Antara Kementerian PUPR dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Tabel Perbandingan Sasaran Strategis Antara Kementerian PUPR dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

No	IKU	Satuan	Target Total Renstra 2017-2022	Realisasi Capaian Kinerja DBM sampai dengan 2022	Ket.
	<b>MLCI</b>	%	63	N/A	Data belum diterima sampai laporan ini dibuat
	<b>Jumlah titik macet</b>	titik	0	0	Tercapai
	Penambahan Road Ratio	%	0.0160	0.0188	Tercapai
	Penambahan Luas jalur pejalan kaki	m <sup>2</sup>	732,000	781,972	Tercapai
	Persentase Kondisi Jalan Mantap	%	98	97	Tidak tercapai
	Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m)	m	150,000	148,019	Tidak tercapai
	Persentase cakupan pencahayaan kota	%	100	100	Tercapai
	persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system	%	100	100	Tercapai

No	IKU	Satuan	Target Total Renstra 2017-2022	Realisasi Capaian Kinerja DBM sampai dengan 2022	Ket.
	Indeks kepuasan pelayanan Laboratorium di Bidang Kebinamargaan	poin	4	4	Tercapai
	<b>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran</b>	%	91	91.98	Tercapai
	indeks kepuasan pelayanan kantor	poin	4	4	Tercapai

Sumber: E-Monev

Pada tahun 2020, Ketika terjadi gelombang Pandemic Covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi keuangan DKI Jakarta, maka seluruh anggaran pembangunan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dialihkan menjadi anggaran darurat Covid-19, sehingga seluruh kegiatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Akibat dari kebijakan itu, maka pada pertengahan tahun 2020, Bappeda berinisiasi untuk melakukan revisi target Renstra.

### **3.6 PERBANDINGAN SASARAN STRATEGIS ANTARA KEMENTERIAN PUPR DENGAN DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

Isu Strategis yang diampu oleh Perangkat Daerah haruslah selaras dan mendukung pelaksanaan program/kegiatan strategis nasional, ataupun program/kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dan pemenuhan terhadap Indikator-Indikator pembangunan yang ditetapkan baik secara nasional maupun internasional, serta menjawab isu-isu global yang terjadi. Karena Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan jalan, dan jembatan, maka Dinas Bina Marga untuk sasaran strategis diusahakan untuk selaras dengan Kementerian PUPR. Pada Gambar 16. dapat dilihat Target utama Kementerian PUPR yang berkaitan dengan Dinas Bina Marga.



**Tabel 2.1 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan**

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
<b>58,5 m<sup>3</sup> /kapita/tahun</b> Peningkatan Kapasitas Daya Tampung  <b>61 Unit</b> Bendungan  <b>500 Unit</b> Pembangunan Embung  <b>500.000 Ha</b> Pembangunan Daerah Irigasi  <b>2.000.000 Ha</b> Rehabilitasi Jaringan Irigasi  <b>50 m<sup>3</sup>/detik</b> Ketersediaan Air Baku  <b>2.100 Km</b> Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai  	<b>2.500 Km</b> Pembangunan Jalan Tol  <b>3.000 Km</b> Pembangunan Jalan Baru  <b>38.328 m</b> Pembangunan Jembatan  <b>31.053 m</b> Pembangunan Fly Over/Underpass  	<b>100%</b> Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan  <b>90%</b> Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman  <b>10.000 Ha</b> Penanganan Permukiman Kumuh  <b>100%</b> Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan  <b>5.555 Unit</b> Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar  	<b>51.340 Unit</b> Rumah Susun  <b>10.000 Unit</b> Rumah Khusus  <b>813.660 Unit</b> Rumah Swadaya  <b>262.345 Unit</b> PSU Perumahan  

Gambar 8. Target Utama Kementerian PUPR  
Sumber: RPJMD Kementerian PUPR

Berikut Perbandingan Sasaran Strategis Antara Kementerian PUPR dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta pada tabel dibawah ini.

Tabel 119. Tabel Perbandingan Sasaran Strategis Antara Kementerian PUPR dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	KEMENTERIAN PUPR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi	Penambahan Road Ratio	0,0032 %	0.0088 %	Penambahan Jalan 2.500 km dan Jembatan Baru/FO 60.000 m
		Penambahan luas jalur pejalan kaki	146.400 m <sup>2</sup>	110,449 m <sup>2</sup>	-
2	Mempertahankan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Jalan Mantap	96 %	98 %	96 %
3	Meningkatkan panjang yang memiliki prasarana jaringan utilitas	Panjang Jalan yang memiliki prasarana jaringan utilitas	30.000 m	32,266 m	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	KEMENTRIAN PUPR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	Penyediaan, Pengelola dan pengembangan pencahayaan kota yang hemat energi	Presentase Pencahayaan Kota	100%	100 %	-
		Pencahayaan Kota Hemat Energi berbasis Smart System	100%	100 %	-

Sumber: E-monev

Dapat dilihat pada Tabel 19. perbandingan antara sasaran strategis antar Kementerian PUPR dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dimana terdapat kesamaan sasaran strategis meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi, yaitu indikator kinerja penambahan road ratio dan presentase kondisi jalan mantap.

Namun diantara kedua indikator kinerja terdapat perbedaan jenis target dimana Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menargetkan penambahan jalan berupa road ratio sedangkan Kementerian PUPR menargetkan penambahan jalan dan jembatan secara terpisah dengan satuan meter dan kilometer.

### **3.7 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DI LAKUKAN**

Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022.

Beberapa Indikator kinerja sasaran strategis yang menggambarkan keberhasilan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah:

- 1) Tercapainya Jumlah titik macet sebanyak 0 titik, dari target 0 titik.
- 2) Tercapainya Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 91,98%, dari target tahunan sebesar 91%.
- 3) Tercapainya Pelaksanaan Rencana Aksi dari Kegiatan Strategis Daerah, dimana terdapat 7 (tujuh) rencana aksi dengan rata rata capaian 100% dan 4 (empat) rencana aksi lainnya 95,00%; 85,00%; 99,44%; dan 99,98%.

4) Tercapainya setiap Indikator Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional.

### 3.8 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun Anggaran 2022 pada tabel dibawah ini.

Tabel 20. Tabel efisiensi penggunaan sumber daya Tahun Anggaran 2022  
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Sasaran strategis	Indikator sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	<i>Most Livable City Index</i> (MLCI)	N/A	82,96%	17,04%
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta	Jumlah titik macet	100%	82,96%	17,04%
		100%	91,04%	8,96%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	101,08%	96,04%	3,96%

Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari program yang terget sarasanya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan dengan capaian output N/A dikarenakan belum rilisnya penilaian dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) di tahun 2022 dan penyerapan anggaran 82,96% sehingga tingkat efisiensinya adalah 17,04%.
2. Sasaran strategis Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan, dan Terjangkau Bagi Semua Masyarakat Jakarta dengan capaian output sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 82,96% untuk Program Penyelenggaraan Jalan sehingga tingkat efisiensinya adalah 17,04% dan penyerapan anggaran sebesar

91,04% untuk Program Pengembangan Jasa Konstruksi sehingga tingkat efisiensinya adalah 8,96%.

- Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan capaian output sebesar 101,08% dan penyerapan anggaran 96,04% sehingga tingkat efisiensinya adalah 3,96%.

### 3.9 ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA PEN

Pada Tahun 2022 Dinas Bina Marga juga masih menerima dana PEN untuk mendukung pendanaan penyelesaian kegiatan pembangunan jembatan dan flyover. Adapun detail dari Penyerapan dana PEN Dinas Bina Marga adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Tabel Rekapitulasi Penggunaan Dana PEN Tahun Anggaran 2022  
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Penyerapan Dana Pinjaman Tahapan Pertama	Pembayaran ke Pelaksana Kegiatan Tahapan Pertama				Progres Pelaksanaan Kegiatan
	Nama Kegiatan (Sesuai KAK)	Tanggal Pembayaran SP2D	Nomor SP2D	Nominal Pembayaran	Nama Pelaksana Kegiatan/ Nama Yang Berhak (Lahan)
6	11	12	13	15	33
Peningkatan Jembatan Akses Rusun Pesakih	23/06/22	1 014643/SP 2D/VI/2022	359,608,333	PT Terasis Erojaya	100%
	23/06/22	1 014648/SP 2D/VI/2022	8,878,478,882	PT Mitra Andalan Sakti	
<b>Total</b>			9,238,087,215		

Sumber: Laporan Dinas Bina Marga

Pada anggaran PEN di Dinas Bina Marga tahun anggaran 2022, Dinas Bina Marga telah menyelesaikan Kegiatan Peningkatan Jembatan Akses Rusun Pesakih dapat menyerap anggaran sebesar Rp.9.238.087.215,- seharusnya kegiatan ini direncanakan selesai pada tahun 2021, namun terkait kendala permasalahan lahan, maka kegiatan fisik tertunda pelaksanaannya sampai dengan tahun 2022. Adapun kegiatan lain yang seharusnya diselesaikan pembayarannya menggunakan PEN adalah

Pembangunan Jembatan Sejajar Pasar Minggu, namun dikarenakan pada proses pemeriksaan auditor internal dan eksternal yang masih berjalan, maka diputuskan untuk pembayaran kegiatan tersebut menggunakan dana APBDP TA 2022 sebesar Rp. 5,864,914,263,-.

### **3.10 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Berikut data analisis Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Bina Marga pada tabel dibawah ini.

Tabel 21. Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Program	Pagu APBDP	Realisasi	Capaian Terhadap APBDP	Kegiatan	Pagu APBDP	Realisasi	Capaian Terhadap APBDP
Program Penyelenggaraan Jalan	1,738,699,690,758	1,442,443,438,330	82.96%	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1,738,699,690,758	1,442,443,438,330	82.96%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	432,803,388	394,030,310	91.04%	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	432,803,388	394,030,310	91.04%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	458,771,580,400	440,603,401,228	96.04%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148,302,852,764	136,197,033,906	91.84%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	21,838,350,800	21,525,250,892	98.57%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,493,445,054	17,110,279,198	97.81%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244,826,982,728	240,794,716,948	98.35%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,309,949,054	24,976,120,284	94.93%

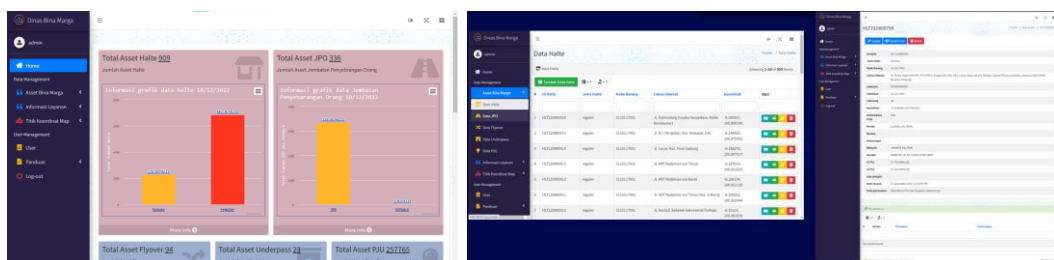
Realisasi serapan anggaran Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 90%. Sedangkan untuk Program Penyelenggaraan Jalan tidak dapat mencapai target dikarenakan efisiensi dan kegiatan yang tidak dapat diprediksi pelaksanaannya.

### 3.11 INOVASI DAN PRESTASI DINAS BINA MARGA

Inovasi diharapkan menjadi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan. Hal tersebut mengingat perubahan yang semakin masif dan keinginan masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, mudah, efektif, dan efisien. Oleh karena itu Dinas Bina Marga selalu berpacu agar dapat membuat sesuatu yang inovatif dan bermanfaat dan diusahakan tidak membebankan Anggaran Daerah. Adapun serangkaian inovasi dan prestasi Dinas Bina Marga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### 1. Aplikasi Sistem Informasi Penunjang Ke-binamarga-an (SISKA)

Aplikasi Sistem Informasi Penunjang Ke-binamarga-an (SISKA) adalah aplikasi pengelola data yang dinamis secara langsung atau *real-time* dan bisa menampilkan data dalam format GIS (*Geographic Information System*) berupa peta digital yang merepresentasikan data infrastruktur ke-binamarga-an yang ada, dan dilengkapi dengan fitur yang sudah terintegrasi dengan dengan beberapa aplikasi yang sudah ada, dilengkapi dengan pemantauan pengguna dan kelola akun user yang sudah disediakan oleh aplikasi SISKA. Layanan informasi memuat data informasi terkait aset milik Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta berupa Halte, JPO/Jembatan Penyeberangan Orang, Flyover, Underpass, PJU/Penerangan Jalan Umum, Sondir, dan Peil BMPP.

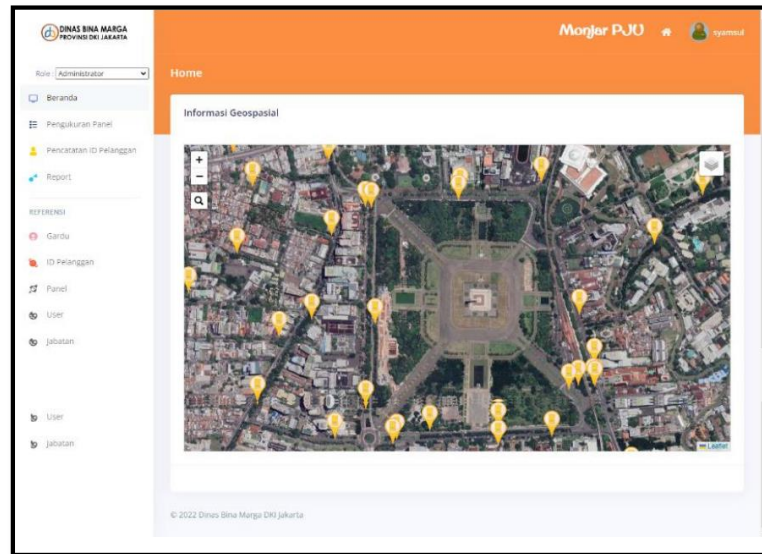


Gambar xx. Tampilan pada Aplikasi Sistem Informasi Penunjang Ke-binamarga-an (SISKA)

#### 2. Sistem Aplikasi Monitoring Jaringan PJU

Sistem Aplikasi Monitoring Jaringan PJU adalah suatu aplikasi yang mendukung pelaksanaan monitoring jaringan PJU secara digital untuk menggantikan pencatatan dilakukan secara manual melalui kartu kendali yang tersedia di Panel saat ini. Adapun tujuan kegiatan meningkatkan kemudahan, kecepatan, ketepatan

dan akurasi dalam proses Monitoring Jaringan PJU pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Bina Marga Lima wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

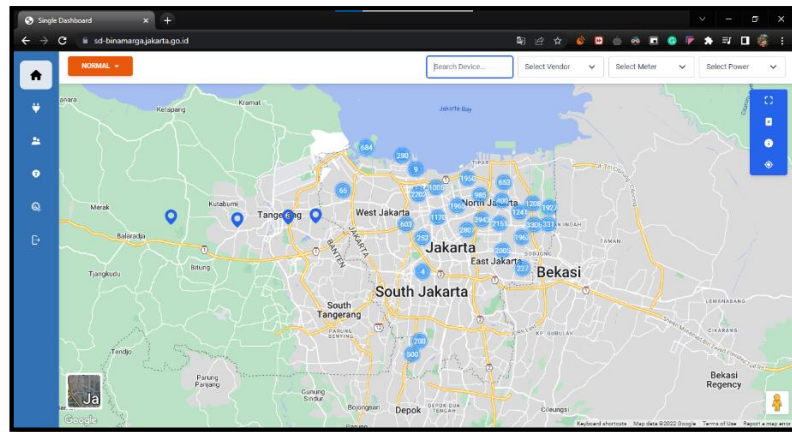


Gambar xx. Tampilan beranda pada Aplikasi Monitoring Jaringan PJU

### 3. Single Dashboard SMART PJU

*Single Dashboard* merupakan Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Kebinamargaan dimana proses pengembangan tersebut bisa memberikan data yang bisa digunakan sebagai informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan SMART PJU. *User Interface* (UI) diharapkan mampu mengoperasikan sistem dari alat sehingga dapat melakukan beberapa penyesuaian kondisi pada lampu yang diinginkan seperti penyesuaian kuat pencahayaan pada lampu, perubahan waktu menyala dan mati dan pengelompokan berdasarkan grup wilayah, meteran, watt dan gardu/meteran sehingga mempermudah dalam pengecekan rutin maupun berkala terkait keberfungsian lampu penerangan jalan.

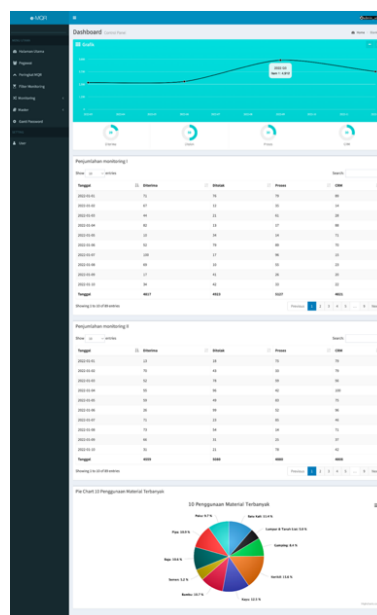




Gambar xx. Tampilan beranda pada *Single Dashboard SMART PJU*

#### 4. Aplikasi *Quick Response Bina Marga*

Aplikasi *Quick Response Bina Marga* adalah aplikasi yang dapat memudahkan dalam melaksanakan fungsi input kegiatan, monitoring harian, pembuatan laporan harian, pembuatan laporan berkala dan perencanaan kebutuhan material dan kelengkapannya terkait Infrastruktur Bina Marga. Monitoring live harian aplikasi *Quick Response Bina Marga* merupakan halaman yang berfungsi untuk memasukkan kegiatan, data yang dimasukkan adalah tanggal, lokasi (peta dan teks), template, sub template, material, foto pengerjaan ketika (0%, 50%, dan 100%).



Gambar xx. Tampilan beranda pada Aplikasi *Quick Response Bina Marga*



**3.12 TINDAK LANJUT ATAS SARAN DAN REKOMENDASI DALAM LAPORAN KINERJA TERHADAP BUDAYA KERJA ORGANISASI**

Atas saran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk lebih optimal dalam bekerjasama maupun berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain terkait dengan pemenuhan kinerja, dalam hal ini ialah pembangunan infrastruktur. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Kegiatan Strategis Daerah dimana berbagai Organisasi Perangkat Daerah terkait terlibat dalam perencanaan kinerja dan pencapaian keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. Selain itu, pada tahun 2022 Dinas Bina Marga juga telah melakukan inovasi dari segi IPTEK dalam industri dan bisnis konstruksi seperti Sistem Aplikasi Monitoring Jaringan PJU dan single dashboard PJU sehingga memudahkan dalam monitoring jaringan PJU dan pelaksanaan pekerjaan penerangan jalan. Dari tindak lanjut atas saran dan rekomendasi tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan kinerja sudah sejalan dengan budaya kinerja organisasi.

## BAB 4 - PENUTUP

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan kinerja Dinas Bina Marga menguraikan realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja awal tahun anggaran yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2017-2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA SKPD) serta dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik simpulan terkait dengan kinerja tahun 2022. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Dinas Bina Marga terhambat adanya pandemi COVID-19 dan refocusing anggaran. Namun masih dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan dilihat dari capaian penuntasan target Indikator Sasaran Utama (IKU) dan capaian keuangan yang masih dalam interval Tinggi-Sangat Tinggi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) sebagai berikut :

- IKU Pertama, Most Liveable City Index / MLCI, target tahunan sebesar 63% dan realisasinya sampai dengan saat laporan ini dibuat belum diterima oleh Pemprov DKI Jakarta dari IAP sehingga capaian realisasi dari target tersebut belum terukur dengan baik, namun Dinas Bina Marga telah berupaya secara maksimal untuk mencapai target tersebut dengan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas jalan, melakukan pemeliharaan jalan sehingga jalan tetap berada dalam kondisi mantap, melakukan pembangunan dan pemeliharaan trotoar untuk mendukung pembangunan yang berorientasi transit, melakukan pembangunan serta revitalisasi fasilitas umum seperti JPO dan halte, serta melakukan pencahayaan kota yang hemat energi, sehingga dengan upaya2 tersebut diharapkan Jakarta menjadi kota yang layak huni bagi seluruh

masyarakatnya Jumlah anggaran yang terserap untuk mencapai kinerja tersebut dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.197.904.074.54,- penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.883.440.869,86,- atau 85.69 %

- Jumlah titik macet, target tahunan adalah sebesar 0 titik macet dan pada akhir tahun anggaran realisasi berkurang menjadi 0 titik macet, pada dasarnya untuk sasaran strategis Jumlah titik macet, Dinas Bina Marga merupakan SKPD Pendukung dari Dinas Perhubungan. Jumlah anggaran yang terserap untuk mendukung tersukseskannya sasaran strategis ini dari pagu anggaran sebesar Rp 1,738,699,690,75,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp Rp. 1,442,443,438,33,- atau 82.96 %
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, target tahunan sebesar 91% dan realisasinya adalah 91.98 %. Jumlah anggaran yang terserap untuk mencapai kinerja tersebut dari pagu anggaran sebesar Rp458,771,580,400,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 440,603,401 ,- atau 96.04 %

## **4.2 SARAN**

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Bina Marga agar tetap dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Terhadap hambatan dan kendala yang ditemui terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal akan terus diupayakan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki Dinas Bina Marga. Demi menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, maka dirumuskan beberapa saran serta masukan sebagaimana berikut :

- Sebagai dampak akibat Pandemi Covid-19, maka kondisi keuangan Provinsi DKI Jakarta menjadi kurang stabil sehingga terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman, oleh karena itu diharapkan lebih optimal pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan.
- Disarankan untuk penentuan IKU SKPD sebaiknya tidak bergantung kepada Lembaga diluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Diperlukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pembangunan infratraktur yang komprehensif sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun berikutnya harus berorientasi pada pencapaian outcome dengan timeline yang lebih sesuai, sehingga target kinerja dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan perencanaan anggaran yang baik.
- Sedangkan dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu sumber daya utama dalam industri dan bisnis konstruksi sehingga perlu adanya pengembangan pemanfaatan teknologi konstruksi seperti *green construction* dan *sensitive water urban design*.

## **LAMPIRAN**